

**ETNOGRAFI KOMUNITAS LOKAL DI KAWASAN TAMBANG BAHODOPI
KABUPATEN MOROWALI SULAWESI TENGAH**

***ETHNOGRAPHY OF LOCAL COMMUNITIES IN THE MINING AREA BAHODOPI,
MOROWALI REGENCY, CENTRAL SULAWESI***



**M. JUNAI
E023191003**



**PROGRAM STUDI DOKTOR ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR 2024**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang.

Wilayah Bahodopi sekarang ini sudah berkembang menjadi kawasan industri tambang nikel terbesar di Indonesia. Situasi wilayah Bahodopi ramai dengan kendaraan yang lalu lalang, baik kendaraan perusahaan tambang dan karyawan, maupun kendaraan umum yang melintasi jalur trans sulawesi yang menghubungkan kabupaten Morowali Sulawesi Tengah dan kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara. Kondisi yang jauh berbeda sebelum berkembang menjadi kawasan tambang, Bahodopi adalah wilayah yang sepi berada di wilayah terluar Sulawesi Tengah yang jarang dilewati kendaraan serta jauh dari pusat akses pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan.

Cerita tentang Bahodopi mengendapkan memori bagi komunitas lokal tentang perubahan-perubahan yang terjadi begitu pesat mengubah wajah kawasan ini. Bahodopi di masa lalu merupakan daerah pelosok dan terpencil seolah berada di ujung negeri. Wilayah ini ditempati oleh kelompok masyarakat petani dan nelayan yang hidup sederhana dan bersahaja, jauh dari peradaban serta terbatas akses transportasi, terbatas layanan sarana dan prasarana dari pemerintah, terbatas akses informasi dan komunikasi, sebuah penggambaran yang minim tentang kondisi wilayah dan masyarakat yang jauh dari pembangunan.

Bahodopi pada masa itu merupakan wilayah yang berada pada jalur jalan yang menghubungkan wilayah Sulawesi Tengah ke wilayah Sulawesi Tenggara dengan akses jalan aspal namun sempit, lalu lintas jalan sepi karena jarang dilewati oleh kendaraan umum. Lingkungan permukiman penduduk sepanjang jalan mengikuti pesisir pantai dengan ciri khas rumah masyarakat perdesaan diselingi lahan persawahan dan kebun jambu mente. Rumah penduduk umumnya berbentuk semi permanen, hanya beberapa bangunan yang terlihat agak bagus. Aktivitas pada malam hari juga terbatas karena karena umumnya adalah masyarakatnya dominan adalah komunitas pencocok tanam yang menghabiskan waktunya bekerja di sawah dan kebun pada siang hari dan beristirahat pada malam hari. Desa-desa di Bahodopi adalah bagian terluar dari Sulawesi Tengah yang memberikan kesan hampir tidak tersentuh oleh pembangunan.

Wilayah Bahodopi kini menjadi tempat tujuan pencari kerja dari berbagai wilayah di Indonesia dan tenaga kerja asing dari negara-negara yang menginvestasikan modalnya pada perusahaan tambang nikel di Bahodopi. Perusahaan yang beroperasi dalam kawasan PT. IMIP pada tahun 2018 sebanyak 15 perusahaan dan pada tahun 2024 sebanyak 52 perusahaan (P4K-UNTAD, 2019; Humas PT.IMIP. 2023). Begitu juga dengan pesatnya perkembangan jumlah tenaga kerja yang datang pada tahun 2018 jumlah pekerja tercatat sejumlah 24.000. Jumlah penduduk pada tahun 2018 sebanyak 7.517 jiwa atau jumlah rumah tangga sebanyak 1.738 (BPS Morowali, 2018). Mengacu pada kondisi eksisting 2018, jumlah karyawan PT. IMIP per Agustus 2018 sebanyak 24.000 pekerja. dan pada tahun 2024 sebanyak 80.000 (P4K-UNTAD, 2019; PT.IMIP, 2023).

Wajah yang berbeda jika dibandingkan dengan kondisi sekarang ini, kawasan Bahodopi menjadi jalan trans-sulawesi yang ramai dan padat dan menjadi tempat tujuan utama karena tumbuh menjadi kawasan tambang yang membuka peluang kerja baik pada perusahaan maupun sektor informal sehingga menarik minat orang untuk datang. Jalan raya ramai dengan kendaraan yang lalu lalang karyawan pabrik

yang terbagi dalam 2-3 shift (pagi, siang dan malam) setiap hari karena pada pabrik tertentu bekerja nonstop selama 24 jam. Pada saat pergantian shift suasana jalan menjadi macet karena arus pekerja yang masuk menjadi shift pengganti berjumlah ribuan pekerja dengan kendaraan motor. Suasana padat dan macet lebih terasa pada saat pergantian shift sore karena banyak karyawan tidak langsung pulang melainkan singgah di café sekedar bersantai atau makan di warung sebelum pulang ke kos untuk beristirahat.

Jasa angkutan barang dan transportasi penumpang trayek yang menghubungkan Bahodopi dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama di Sulawesi seperti Kota Palu, Makassar dan Kendari tersedia secara reguler memudahkan mobilitas barang dan manusia. Pada saat siang hari jalan raya lebih banyak dipadati dengan dump truck angkutan material yang menyeberangi jalan utama dari tempat penambangan *ore'* menuju ke tempat penimbunan material tambang (*ore'*) sekitar pelabuhan (*jetty*) dan kendaraan operasional perusahaan berupa kendaraan jenis *double cabin 4x4*, mobil dump truck angkutan material yang berukuran besar dan kendaraan roda milik karyawan. Ramainya angkutan dump truck material menyebabkan debu berterbangan disertai dengan polusi dari mesin kendaraan.

Situasi pada malam hari sebelumnya sangat sepi karena tidak ada lagi aktivitas setelah bekerja di sawah atau kebun berganti suasana ramai dan terang benderang. Di sepanjang jalan desa-desa yang berada disekitar kawasan PT. IMIP saat malam hari ramai dengan pekerja tambang yang singgah di café, warung kopi menjadi tempat bergaul atau sekedar melepas lelah setelah bekerja. Situasi pemandangan yang sama dengan situasi di kota-kota yang sudah maju, memupus ingatan tentang Bahodopi beberapa tahun sebelumnya yang kadang gelap gulita karena terbatasnya pasokan listrik. Sekarang ini, kebutuhan listrik di kawasan Bahodopi dan Morowali secara umum diperoleh dari PLN yang dipasok dari PT. Poso Energy (Kalla Group) dan powerplant yang dibangun dalam kawasan PT. IMIP.

Lingkungan permukiman di desa-desa yang berada dalam wilayah kecamatan Bungku Timur, kecamatan Bahodopi, dan kecamatan Bungku Selatan disekitar wilayah beroperasinya perusahaan tambang tumbuh menjadi lingkungan permukiman yang padat. Mobilitas pencari kerja yang melamar kerja pada perusahaan tambang maupun mobilitas pekerja sektor informal yang datang ke Bahodopi menyebabkan kebutuhan dan pemanfaatan terhadap lahan sangat tinggi. Lahan-lahan kosong di wilayah permukiman menjadi bangunan rumah atau kamar sewa (*kos*) yang disewakan kepada pekerja. Lahan-lahan strategis di pinggir jalan utama dibangun ruko-ruko, penginapan, hotel, dan atau disewakan untuk usaha kecil. Beberapa pengembang (*depelover*) mulai membangun perumahan sejak 2021 di wilayah Bahodopi dengan mengadopsi konsep model pertumbuhan permukiman di kawasan kota yang memaksimalkan penggunaan lahan. Kompleks perumahan seperti Perumahan Bahodopi Residence oleh PT. Pembangunan Perkasa Raya, Perumahan Agung Aulia Residence di jalan hauling Lalampu, Perumahan Soliwu Cipta Persada dan Perumahan Puspa Griya. Perumahan ini dibangun dengan target sasaran pasarnya adalah karyawan perusahaan tambang di kawasan Bahodopi.

Kawasan Bahodopi tumbuh dan berkembang menjadi kota dengan sejumlah fasilitas seperti hotel sekelas bintang tiga dan penginapan. Di desa Keurea terdapat 1 hotel dan 7 penginapan, desa Fatufia sebanyak 1 hotel dan 2 penginapan, di desa Bahodopi sebanyak 5 hotel dan 16 penginapan dan di desa Bahomakmur terdapat 1 penginapan. Sarana perbelanjaan di Bahodopi berupa mini swalayan dan minimarket seperti Indomaret dan Alfamart sebanyak 15 toko, Mr. DiY, bahkan di desa Labota

terdapat swalayan Matahari. Rumah makan atau restoran sebanyak 15 Unit termasuk rumah makan *franchise* (waralaba) seperti CFC (California Fried Chicken) dan Hisana Fried Chicken. Di wilayah Bungku Timur terdapat 2 hotel dan 14 penginapan, sebanyak 7 mini market Indomaret dan Alfamart. Keberadaan sarana berbelanja ini menunjukkan semakin kompleks dan beragamnya karakteristik konsumen yang berada di Bahodopi sekarang ini yang mendefinisikan kebutuhan dan gaya berbelanja yang berbeda pada umumnya.

Sektor usaha informal juga tumbuh berkembang seiring dengan berkembangnya kawasan industri Bahodopi. Peluang pekerjaan terbuka pada sektor dunia usaha meningkat berimplikasi pada pendapatan yang besar menarik datangnya barang-barang dan jasa. Banyak pendatang dari luar Bahodopi dan orang lokal membuka usaha sebagai bagian dari rantai pemenuhan kebutuhan dan distribusi perdagangan yang melayani sebagian besar kebutuhan pekerja di sektor tambang. Usaha skala rumahan seperti warung makan, jualan makanan jadi, jualan kue, usaha jualan barang kelontong, usaha sembako, bengkel motor, usaha counter pulsa dan paket data seluler, usaha laundry bermunculan di daerah padat penduduk tempat pekerja tinggal. Bagi usaha di sektor informal, banyaknya pekerja pendatang adalah konsumen atau pasar yang membutuhkan jasa mereka.

Kawasan Bahodopi saat ini telah berkembang menjadi pusat industri yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat di Bahodopi. Perubahan ekonomi menjadi lebih baik setelah masuknya perusahaan tambang. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Morowali pada periode 2010–2016 mengalami penurunan. Perkiraan penduduk miskin pada tahun 2010 sebesar 20,27%, pada tahun 2011 sebesar 18,85%, pada tahun 2012 sebesar 17,25%, pada tahun 2013 sebesar 15,92 %, pada tahun 2014 sebesar 14,97%, pada tahun 2015 sebesar 15,80% dan pada tahun 2016 sebesar 15,13%. Pertumbuhan ekonomi kabupaten Morowali menempati urutan keempat nasional dan urutan kedua se-provinsi Sulawesi Tengah dengan laju pertumbuhan sebesar 13,18%. Rata-rata pengeluaran rumah tangga per kapita selama sebulan untuk konsumsi makanan sebesar Rp. 1.940.445 dan pengeluaran untuk bukan makanan sebesar Rp. 1.281.699 (Badan Pusat Statistik, 2017).

Perusahaan tambang nikel mengubah *landskap* wilayah Bahodopi yang sebelumnya adalah daerah agraris (pertanian dan perkebunan) menjadi kawasan industri pertambangan nikel. Bahkan kecenderungan terakhir terkait dengan kepentingan nasional dan global, aktivitas pertambangan nikel dan investasi modal asing dan nasional semakin berkembang. Ekspansi pertambangan di kabupaten Morowali dalam waktu 20 tahun terakhir meningkat secara signifikan. Sejak kabupaten Morowali dimekarkan dari kabupaten Poso pada tahun 1999, sebanyak 177 perusahaan asing dari 204 IUP memperoleh izin yang diterbitkan oleh Bupati Morowali dan menguasai sekitar 600.089 hektar lahan. Dari sejumlah izin tersebut, sebanyak 45 IUP yang diterbitkan tumpang tindih dengan IUP milik perusahaan tambang lain yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Dalam area kontrak karya PT. Vale Indonesia (dulu PT. Inco) di blok Bahodopi dan blok Kolonodale tumpang tindih. Izin Usaha Pertambangan diterbitkan sebanyak 12 perusahaan pada area kontrak karya PT. Vale di blok Kolonodale seperti PT. Bangun Bumi Indah, PT. Cipta Utama Maranti, dan PT. Graha Sumber Mining Indonesia, dan sebanyak 33 IUP di blok Bahodopi (Andika, 2010).

Bahodopi kemudian menjadi lokasi paling massiv dalam eksplorasi pertambangan nikel. Jika ditelusuri perkembangan pertambangan terkait perebutan areal konsesi tambang nikel di wilayah ini, maka kita akan menemukan bagaimana narasi konflik kepemilikan IUP ataupun kontrak karya perusahaan multinasional dan

nasional seperti tumpang tindih lahan IUP milik PT. Rio Tinto Indonesia dengan PT. Bintang Delapan Mineral yang diselesaikan melalui pengadilan arbitrase internasional. Sebagian besar lahan pertambangan itu kemudian menjadi milik PT. BDM. Sejak itu *landscap* sosial dan kepemilikan lahan di kabupaten Morowali berubah pesat. Di kawasan inilah perubahan paling drastis meliputi wilayah-wilayah proyeksi eksploitasi dan industri pengolahan nikel di pesisir kecamatan Bahodopi hingga kecamatan Bungku Selatan.

Perkembangan yang mengubah wajah Bahodopi adalah ketika desa Fatufia menjadi pusat kawasan industri pengolahan bijih nikel (smelter) oleh PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). PT. IMIP yang merupakan pengembangan dari PT. Bintang Delapan Mineral (PT.BDM) yang telah lebih awal menguasai IUP dan melakukan pertambangan material (ore') di Bahodopi. Masuknya investor Cina melalui perusahaan Shanghai Decent Investment (Group) Co. Ltd bekerja sama dengan PT. Bintang Delapan Investama mendirikan PT. Sulawesi Mining Investment (SMI) pada tahun 2009, mulai melakukan pengembangan terhadap tambang nikel seluas hampir 47.000 hektar di kabupaten Morowali.

Pertambangan mineral logam seperti nikel, tembaga dan besi telah dilakukan sejak abad ke-17 di wilayah Bungku. Perdagangan tembaga telah dilakukan oleh pedagang Belanda dan Inggris di Pelabuhan Kolonedale pada tahun 1600-an. Peralatan perang prajurit kerajaan Luwu diproduksi setelah meluaskan pengaruh ke kerajaan Mori memanfaatkan tembaga dan keterampilan orang Mori untuk perdagangan besi dengan kerajaan Majapahit. Penambangan sumber daya mineral dilakukan secara tradisional dan belum mengenal konsep ekstraksi pada lahan luas tetapi penambangan skala kecil memanfaatkan sifat mineral laterit (diper permukaan) untuk penempahan besi, dan perdagangan logam untuk senjata. Material ditambang untuk kebutuhan peralatan-peralatan perang seperti mata tombak, pedang, dan yang peralatan lainnya yang terbuat dari tembaga dilakukan melalui keterampilan tradisional melebur besi (Polinggomang, 2008).

Aditjondro (2002) mengutip catatan Anthony Reid yang menyebutkan bahwa kerajaan Luwu pernah memasok logam besi dan tembaga untuk peralatan perang (senjata) kepada kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore di Maluku Utara. Bahkan sebelum agama Islam berkembang, telah menjadi pemasok biji besi berkadar nikel yang tinggi bagi kerajaan Majapahit. Merujuk pada catatan Nikolas Adriani dan A.C Kruyt (1919;52) bahwa di daerah Malili telah ada penemuan cadangan biji besi dalam jumlah besar dan menghasilkan besi bermutu tinggi dan nikel. Pada periode Pebruari 1917 Dinas Geologi Belanda telah melakukan penyelidikan mineral cadangan biji besi dan nikel di Wuara'u, Bambilano, antara Taranu dan Larono di Sorowako yang merupakan wilayah pekabaran Injil/Zending Belanda sedang dilakukan kegiatan eksplorasi biji besi dan nikel.

Wilayah Bahodopi identik dengan penghuni suku Bungku sebagai pemukim asli menempati wilayah Morowali tersebar di wilayah Bungku Utara, Bungku Selatan, Menui dan Bungku Timur. Suku Bungku yang bermukim di Bahodopi terbagi ke dalam beberapa sub suku seperti Lambatu, Epe' Ro'tua dan Ro'tua. Permukiman lama orang Bungku seperti di Bahomotefe, Siumbatu, Lalampu, Keurea, Bahodopi. Wilayah Bahodopi yang beririsan dengan wilayah Konawe Sulawesi Tenggara menyebabkan banyak suku Tolaki yang tinggal di wilayah Bahodopi. Di wilayah pesisir pantai Bahodopi terdapat suku Bajo yang menetap dan membangun rumah di permukiman penduduk, berbaur dengan pemukim asli.

Kelompok pemukim lainnya adalah pendatang dari suku Toraja-Bugis sejak 1958 di desa Dampala dan desa Lele. Mereka berasal dari wilayah Lere'ea dan

Batupali datang mencari perlindungan karena gangguan keamanan dari gerakan DI/TII sehingga TNI memerintahkan masyarakat untuk keluar ke wilayah yang aman seperti di Bungku. Pada tahun 1991 melalui program transmigrasi Bahodopi menjadi tujuan penempatan transmigran asal Jawa Tengah, Jawa Timur, Lombok, dan Bali seperti UPT. Bahomotefe (menjadi desa Onepute Jaya). Di desa Lele juga ditempatkan transmigran desa potensial (despot) dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di desa Makarti Jaya juga ditempatkan transmigran asal Lombok dan di desa Bahomakmur ditempatkan transmigran asal Jawa, Lombok dan Bali. Kelompok masyarakat inilah yang merupakan pemukim lama mendiami wilayah Bahodopi sebelum berkembang menjadi kawasan tambang nikel.

Kehidupan kelompok pemukim lama ini sangat tergantung pada lingkungan dan potensi sumberdaya alam yang tersedia dan aktivitas mata pencaharian masyarakat di Bahodopi sudah dilakukan dalam waktu yang lama. Lingkungan alam berupa pesisir pantai, dataran rendah (lembah), rawa-rawa, perbukitan dan pegunungan menjadi ruang produksi ekonomi bagi komunitas lokal yang bermukim di Bahodopi. Mencari damar dan rotan dilakukan oleh orang Bungku dan orang Tolaki dalam hutan dan gunung-gunung. Selain itu, mereka bercocok tanam di kebun dengan tanaman pangan seperti tanaman ubi, jagung pada area perbukitan dan tanaman palawija dan sayuran pada lahan datar di area lembah. Kebutuhan pangan juga diperoleh dari alam berupa pohon sagu yang tumbuh di rawa-rawa, oleh komunitas lokal diolah menjadi sagu untuk bahan makanan.

Bercocok tanam berupa pertanian padi sawah diperkenalkan oleh orang Bugis yang masuk membuka lahan persawahan di beberapa desa di Bahodopi. Pertanian padi sawah semakin meluas dengan pencetakan sawah yang dilakukan di Bahodopi setelah mendatangkan orang Bugis dari Bone pada tahun 90an awal (Gogali, 2012). Kondisi alam dengan tutupan hutan perawan menjadi sumber cadangan air mengalir melalui sungai-sungai di Bahodopi sehingga memungkinkan dibangun irigasi pertanian untuk mengembangkan pertanian padi sawah. Pertanian padi sawah semakin intensif ketika transmigran dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Lombok dan Bali ditempatkan dan bahkan pernah mengalami surplus beras dan menyuplai daerah lain. Di wilayah pesisir pantai terdapat komunitas Bajo membangun permukiman di desa-desa dan bekerja menjadi nelayan.

Kelapa dalam merupakan tanaman perkebunan yang sudah lama dikembangkan oleh komunitas lokal di Bahodopi. Kelapa dalam diolah menjadi kopra dan diperdagangkan sejak jaman kolonial hingga sekarang ini. Tanaman perkebunan lain yang ditanam adalah jambu mente yang ditanam di lahan perkebunan komunitas lokal Bahodopi pada tahun 1980an, dan tanaman kakao pada tahun 1990an menjadi komoditi sumber ekonomi utama. Pada tahun 2000an tanaman kakao diserang hama sehingga produktivitasnya menurun, demikian juga tanaman jambu mente sebagai tanaman tahunan yang juga merosot hasilnya, hingga beberapa petani mengganti tanaman dengan menanam sawit dan juga tidak berhasil. Pada masa-masa itu, kehidupan komunitas lokal di Bahodopi sangat terpuruk karena ketergantungan mereka terhadap hasil kebun tanaman tahunan yang dikelola tidak mampu memperbaiki kesejahteraan hidupnya.

Dalam kurun waktu yang hampir bersamaan, perusahaan tambang nikel sudah mulai masuk dan beroperasi meskipun terbatas dalam kegiatan penambangan material (*ore*). Penambangan ini mengambil material dan dikirim ke smelter yang beroperasi di Indonesia maupun ke luar negeri. Aktivitas penambangan ini kemudian merubah cara pandang dan perilaku komunitas yang bermukim di kawasan tambang. Penambangan nikel merusak ekosistem sebelumnya sehingga mempengaruhi

sistem mata pencaharian komunitas terutama pada kegiatan pertanian. Perubahan ekologi akibat penambangan yang terjadi menyebabkan sumber air irigasi untuk pertanian menjadi berkurang karena hutan yang menyimpan cadangan air telah digunduli. Saat musim hujan, terjadi banjir membawa material, lumpur dan pasir menggenangi lahan pertanian dan menjadi endapan mengakibatkan kesuburan tanah berkurang, kualitas air tidak cocok untuk kegiatan pertanian. Hal ini menyebabkan kegiatan pertanian padi sawah mulai ditinggalkan oleh beberapa komunitas yang bermukim di kawasan tambang dan mencoba memenuhi kebutuhannya pada mata pencaharian non pertanian. Pertanian padi sawah saat sekarang hanya dilakukan pada komunitas transmigran Lombok, Jawa dan Bali di desa Onepute Jaya dan komunitas di desa Ululere karena relatif belum banyak beroperasi perusahaan tambang sehingga kebutuhan air irigasi dan kualitas airnya cocok untuk persawahan. Pada lahan pertanian yang telah rusak, oleh beberapa pemilik lahan mencoba tanaman baru seperti tanaman sawit namun juga dilerantarkan.

Kegiatan bercocok tanam yang dilakukan sekarang ini adalah membuka lahan kebun di areal perbukitan dan gunung dalam kawasan tambang Bahodopi. Potensi lahan di areal penggunaan lain (APL) maupun areal hutan produksi. Kegiatan ini dilakukan oleh komunitas Bungku dan Tolaki dari desa Bahomotefe, Bahomuahi, Siumbatu dan Ululere, dan Lele. Praktek berkebun juga dilakukan oleh komunitas Toraja dan Bugis dari desa Dampala dan Lele serta sebagian dari komunitas transmigran di desa Lele. Komoditi yang ditanam dominan adalah merica (lada), durian dan tanaman tahunan lainnya.

Kehadiran perusahaan tambang mempengaruhi pola pemanfaatan dan penggunaan lahan, terutama pada perusahaan yang beroperasi melakukan pembebasan lahan dengan nilai transaksi ganti rugi yang mahal baik untuk sarana produksi seperti kantor, pabrik pengolahan (smelter) dan pembangunan jalan (*hauling*) menuju areal pertambangan, pelabuhan. Lahan atau tanah untuk kegiatan pertanian dan perkebunan sudah dikonversi menjadi tempat aktivitas perusahaan tambang. Hasil ganti rugi pembebasan lahan ini menyebabkan terjadinya perubahan gaya hidup pada komunitas-komunitas yang ada kawasan tambang Bahodopi. Persepsi terhadap lahan sebelumnya sebagai faktor produksi berubah menjadi asset yang bernilai ekonomi tinggi sehingga walaupun lahan yang dikuasai atau dimiliki tidak dikelola namun tetap dipertahankan sampai memperoleh penawaran tertinggi.

Perusahaan tambang telah mengubah wilayah Bahodopi menjadi ruang atau arena yang penuh dengan dinamika dengan industrialisasi. Komunitas di desa-desa meninggalkan lahan pertanian dan perkebunan ketika tidak mampu memberikan hasil yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka memilih bekerja di perusahaan tambang jika memenuhi standar kualifikasi dan kebutuhan perusahaan serta menjadi prioritas dalam rekrutmen tenaga kerja. Sedangkan mereka yang tidak memenuhi persyaratan memilih memanfaatkan peluang-peluang baru yang tercipta dengan berubahnya kondisi wilayah dan peruntukannya.

Di sisi lain, pemenuhan kebutuhan (baca=kesejahteraan) seiring dengan beroperasinya perusahaan tambang dan berkembangnya wilayah Bahodopi menjadi kawasan industri pertambangan. Sebagian warga dalam komunitas menjadi tenaga kerja perusahaan memperoleh penghasilan atau gaji tetap untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga, termasuk fasilitas lainnya. Masyarakat lokal Bahodopi cenderung menerima kehadiran perusahaan tambang walaupun terkadang terjadi kontroversi ataupun penolakan. Kesadaran bahwa mereka mereka hidup di wilayah

potensi tambang dan akan mengancam eksistensi mereka namun pada sisi lain mereka harus mempertahankan hidup.

Terbukanya kawasan industri tambang memicu terjadinya migrasi terutama angkatan kerja untuk memenuhi kebutuhan perusahaan ataupun mereka melihat peluang lain seiring berkembangnya kawasan industri tambang di Bahodopi. Desa di Bahodopi kini menjadi ramai, sibuk, padat dan harga barang menjadi mahal. Aktivitas warga berlangsung selama 24 jam karena aktivitas pekerja tambang yang bergiliran bekerja (shift), lalu lalang kendaraan perusahaan dan karyawan. Lingkungan permukiman menjadi terang benderang karena listrik yang digunakan oleh penduduk disubsidi oleh perusahaan. Permukiman menjadi padat karena karyawan dan migran lokal bertambah setiap hari membutuhkan tempat tinggal. Bangunan rumah petak ataupun kamar, warung, kios, toko dan bangunan lainnya terus dibangun pada lahan kosong untuk memenuhi kebutuhan pekerja pendatang. Komunitas-komunitas lokal kini hidup dan tinggal bersama pekerja migran yang menetap berbaur dalam lingkungan permukiman yang sama.

Perubahan pola dan struktur dalam masyarakat yang semula relative homogen menjadi lebih heterogen. Daya tarik perusahaan tambang memicu terjadinya arus pekerja pendatang maupun peluang-peluang ekonomi lainnya (*multiplier effect*). Keberadaan pekerja pendatang dan pelaku ekonomi ini menjadikan hubungan masyarakat dan dinamikanya menjadi lebih kompleks. Keberadaan perusahaan tambang dan pekerja di sektor tambang telah mengubah wajah lingkungan fisik yang sebelumnya adalah masyarakat pekerja di sektor pertanian, perkebunan, menjadi masyarakat pekerja

Demikian juga dengan perubahan sistem nilai budaya yang mendasari hubungan sosial yang tergambar dalam praktek-praktek hubungan sosial. Perbedaan tata nilai, kepercayaan dan tradisi yang menjadi latar budaya dari orang-orang yang berbeda menyebabkan terjadi kompromi-kompromi terhadap nilai-nilai yang mereka pahami dan bahkan cenderung saling menerima (*symbiosis*) dalam praktek budaya tertentu.

Perubahan struktur ekonomi terlihat kecederungan perubahan dalam sistem mata pencaharian penduduk. Komunitas lokal yang sebelumnya bekerja sebagai petani, nelayan, sektor jasa (perdagangan) dan lainnya dengan masuknya perusahaan tambang mengubah struktur mata pencaharian yang ada. Masuknya perusahaan tambang menjadi peluang usaha lainnya dan menjadi bagian dalam aktivitas pekerja di sektor pertambangan. Perubahan ini di satu sisi bernilai baik bagi mereka yang menjadi bagian dari perubahan dan menguntungkan, namun bagi yang lainnya menjadi ancaman bagi eksistensi kehidupannya baik secara ekonomi, sosial dan budayanya. Bagi sebagian besar penduduk di Bahodopi menilai keberadaan perusahaan tambang menjadi berkah dan menjadi solusi dari permasalahan pemenuhan ekonomi keluarga karena hampir semua keluarga minimal ada salah satu anggota keluarganya bekerja pada perusahaan tambang.

Membaca realitas kekinian dalam kawasan tambang seperti di Bahodopi adalah fenomena yang sama berkembang di daerah-daerah kawasan tambang di seluruh Indonesia. Sangat penting mencermati lebih jauh masalah-masalah sosial budaya yang menjadi potensi konflik mengancam dan menjadikannya bagian dalam dinamika dalam penyelesaian masalah-masalah pada masyarakat di kawasan tambang. Ancaman potensi konflik terjadi dalam situasi yang berubah sudah mengemuka dengan membaca gejala-gejala perubahan yang terjadi pada masyarakat dan dinamikanya. Bahodopi bukanlah sebuah ruang kosong tapi merupakan ruang yang ada pemiliknya atau ada orang-orang yang memiliki

keterkaitan secara kultural dan melakukan berbagai aktifitas kehidupan di dalamnya sejak dulu.

Dalam perkembangan perusahaan tambang di Bahodopi, berbagai peristiwa terkait hubungan antara komunitas lokal dengan perusahaan tambang terkait dengan praktek-praktek pertambangan yang dianggap merugikan komunitas lokal. Termasuk juga perubahan struktur dan nilai yang menimbulkan peristiwa kekerasan yang terjadi pada bulan Oktober 2018 di Bahodopi adalah bagian dari akumulasi sejumlah permasalahan yang terjadi dengan keberadaan pekerja pendatang dari etnis tertentu dari luar di kawasan Bahodopi. Hubungan komunitas lokal dan perusahaan tambang terkait rekrutmen tenaga kerja yang menurut penilaian komunitas lokal lebih memprioritaskan kelompok etnis tersebut karena beberapa posisi penting dalam perusahaan dipegang oleh orang-orang dari etnis yang sama.

Kawasan tambang Bahodopi sebagai sebuah entitas masyarakat dan kebudayaan kini menyimpan permasalahan yang kompleks. Terlihat bahwa dinamika sosial dan budaya masyarakat mengalami perubahan akibat hadirnya industri pertambangan. Perubahan ini meliputi pergeseran struktur sosial, peningkatan mobilitas penduduk, dan masuknya budaya baru yang dibawa oleh pekerja migran. Interaksi antara masyarakat lokal dan pekerja pertambangan juga dapat mempengaruhi hubungan sosial dan identitas budaya masyarakat setempat.

Ada permasalahan terkait dengan interaksi antara komunitas lokal dan perusahaan tambang. Kehadiran perusahaan seringkali menciptakan ketegangan dan konflik terkait dengan klaim kepemilikan lahan, pembagian manfaat ekonomi dari perusahaan, hak-hak komunitas (masyarakat) peralihan kepemilikan, dan aktivitas pertambangan yang memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan. Dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pertambangan dan dialami oleh komunitas lokal seperti kerusakan hutan, degradasi lahan, pencemaran air dan udara serta kehilangan habitat dan keanekaragaman hayati.

Beberapa studi tentang hubungan masyarakat, negara dan perusahaan tambang dengan berbagai perspektif menunjukkan proses yang dinamis. Sikap pro dan kontra terhadap kegiatan pertambangan itu sendiri maupun terkait isu-isu global yang terkait dengan pertambangan dan agenda nasional dan global yang menyertainya. Dalam studi Zainuddin, 2012 menggambarkan konflik dan kontestasi pada kawasan tambang emas Poboya di Kota Palu antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat. Tumpang tindih kepentingan peruntukan kawasan yang bersumber dari kebijakan penetapan kawasan Taman Hutan Rakyat (Tahura). Pada kawasan yang sama diterbitkan izin pada PT. Citra Palu Mineral untuk kegiatan pertambangan. Pada ruang yang sama, aktivitas pertambangan juga dilakukan oleh masyarakat "lokal" yang dilindungi oleh Lembaga Adat dengan alasan bahwa kawasan tersebut berada dalam wilayah adatnya. Kawasan ini mengalami pergeseran penguasaan dan pengelolaan dari yang bersifat *common proverty*, kemudian menjadi *state proverty* ketika ditetapkan menjadi kawasan Tahura, dan akhirnya menjadi *privat proverty* ketika hak pengelolaan diberikan kepada korporasi. Konsekwensinya adalah aktivitas pertambangan rakyat harus dihentikan karena pemberian hak penguasaan dan pengelolaan kepada korporasi memicu konflik antara pemerintah, korporasi dan masyarakat lokal.

Ambo Upe (2018) dalam studinya di kawasan tambang emas di Bombana Sulawesi Tenggara menggambarkan pertarungan para aktor dan pemangku kepentingan menguasai sumberdaya alam, menciptakan struktur sosial baru termasuk kelembagaan baru dalam masyarakat. Perspektif Foucault dan Bourdieau digunakan untuk menjelaskan permasalahan ini dengan menggunakan praktik

kontestasi wacana dan kekuasaan. Dinamika penguasaan dan pengelolaan kawasan tambang tentang bagaimana memperoleh legitimasi untuk eksistensinya dan menguasai pemikiran para pihak terutama dengan konteks kontestasi wacana pengelolaan pertambangan dari pihak satu kepada pihak yang lainnya. Legitimasi itu kemudian mengokohkan eksistensi aktor dalam menguasai sumberdaya alam.

Sangaji (2002) berlatar riset yang dilakukan dalam wilayah kontrak karya PT. Inco (PT. Vale) melihat aktivitas pertambangan dalam perspektif ekonomi politik yang dikonsepsikan sebagai "kapitalisme ekstraktif". Bahwa industri pertambangan di Indonesia yang menyuplai kebutuhan industri pemrosesan di negara maju. Perusahaan tambang transnasional seperti PT. Inco menguasai industri dari hulu ke hilir sehingga keuntungan lebih banyak diserap di luar Indonesia karena seperti perusahaan transnasional (PMA) melakukan investasi di negara pemilik sumber daya mineral tambang untuk menyuplai kebutuhan industri bagi negara yang menjadi investor. Pada posisi ini terjadi ketimpangan karena keuntungan seharusnya diperoleh dari nilai bahan mineral yang ditambang justru dinikmati oleh perusahaan modal asing dan negara-negara maju. Masalah ini terkait juga dengan sistem politik yang tidak demokratis, birokrasi yang korup, penegakan hukum yang lemah, serta rendahnya penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia sehingga terjadilah imperialisme mineral.

Muhammad (2017) dalam perspektif sosiologis menggambarkan perlawanan masyarakat terhadap perusahaan tambang (PT. Inco) di Sorowako. Perspektif penjelasannya menggunakan teori gerakan sosial baru (new social movement) dan konsep *accumulation by dispossession*. Gerakan sosial lebih pada perlawanan simbol-simbol identitas dengan menggunakan klaim kepemilikan kolektif dari masyarakat lokal (*indigenous community*) yang mengorganisir diri dalam kelompok sebagai pemukim lama dalam Kerukunan Wawoi'nia Asli Sorowako (KWAS). Harvey (2010) mengenai konsep *accumulation by dispossession* bahwa kapitalisme modern semisal perusahaan transnasional mendapatkan keuntungan dengan cara mengambil alih sumberdaya alam, hak dan kepemilikan, atau akses yang sebelumnya dimiliki oleh komunitas lokal. Proses globalisasi dan neoliberalism memfasilitasi pemusatan kekayaan dan kekuasaan oleh beberapa entitas besar termasuk perusahaan besar dan elit ekonomi. Akumulasi pemiskinan melalui pengambilalihan kepemilikan dan hak sumberdaya, peluang akses terhadap sumberdaya ditutup dengan privatisasi atas nama korporasi, eksploitasi dan ekstraksi terutama nilai tukar yang rendah baik sumberdaya dan tenaga kerja yang didukung oleh kebijakan pemerintah dan hukum.

Gambaran dinamika yang terjadi pada masyarakat lokal ketika terjadi perubahan diakibatkan oleh perusahaan tambang seperti dalam beberapa tulisan di atas. Berbagai perspektif seperti konflik, ekonomi politik, gerakan sosial, keadilan yang menepatkan masyarakat ataupun negara pemilik sumberdaya selalu dirugikan oleh perusahaan atau modal asing. Dinamika yang sama juga terjadi dengan berkembangnya kawasan tambang Bahodopi dan hingga saat ini sudah tumbuh bekembang menjadi sebuah kawasan industri tambang.

Faktanya bahwa sekarang ini komunitas lokal di Bahodopi hidup berdampingan dalam ruang yang sama dengan kegiatan pertambangan dengan segala konsekuensi yang dihadapi terkait dengan perubahan-perubahan ekologi, ekonomi, sosial dan budaya akibat adanya perusahaan tambang. Perubahan ekologi berdampak pada kerusakan ekosistem yang mengakibatkan banjir, lingkungan permukiman tercemari dengan polusi dan limbah dari pertambangan, serta padatnya lingkungan permukiman dengan bangunan baru karena kebutuhan tempat tinggal

untuk pekerja pendatang. Perubahan ekonomi terjadi seperti hilangnya mata pencaharian asli berbasis sumber daya alam seperti petani dan nelayan, beradaptasi dengan mata pencaharian baru yaitu menjadi karyawan perusahaan yang mengatut disiplin kerja, terikat sangat berbeda dengan pekerjaan sebelumnya dilakukan secara otonom dan bebas, serta peluang-peluang ekonomi yang muncul dengan adanya perusahaan tambang dan pekerja tambang yang dapat diakses secara kolektif (komunal) maupun individu.

Peluang ekonomi di sektor informal karena banyaknya pekerja pendatang dalam hal ini sebagai mata rantai ekonomi dimana masyarakat memperoleh keuntungan dari banyaknya pekerja di sektor tambang, dan tentunya relevansinya dengan perubahan tingkat kesejahteraan keluarga mereka. Dalam konteks perubahan sosial, masuknya perusahaan tambang merubah relasi orang dalam bekerja terutama dalam struktur masyarakat pertanian kepada struktur masyarakat industri yang semula relatif setara menjadi hubungan yang lebih struktural, termasuk relasi dalam masyarakat terkait penguasaan sumberdaya.

Perubahan sosial lainnya adalah munculnya kelas pekerja dalam masyarakat industri yang relasi dan ikatan yang dibangun berdasarkan hubungan kerja dalam perusahaan. Perubahan nilai budaya tentang bekerja terutama waktu bekerja yang semula bekerja pagi sampai sore hari berubah menjadi bekerja secara bergantian (shift) selama 24 jam, sebelumnya mereka memiliki waktu luang untuk komunitas dan kerabat untuk kegiatan kolektif dan keluarga dibatasi waktu kerja di perusahaan, pergeseran tanggung jawab ekonomi seorang suami (laki-laki) dalam rumah tangga tidak lagi sebagai penopang tunggal dalam keluarga namun juga melibatkan istri (perempuan) dan anak laki-laki dan perempuan bekerja di perusahaan. Dalam perspektif gender, kaum perempuan bekerja bukan hanya dalam sektor domestik tapi sudah masuk ke sektor publik dengan bekerja di perusahaan.

Ada beberapa hal yang belum terjawab dari penjelasan studi tentang masyarakat dalam hubungannya dengan pertambangan ataupun dengan pemikiran atau perspektif terortitis tertentu dalam studi yang diuraikan diatas. Pertama; terlepas dari ketimpangan yang dialami oleh komunitas lokal dengan masuknya perusahaan tambang, bahwa komunitas lokal di Bahodopi menerima perusahaan tambang melakukan penambangan di wilayahnya. Komunitas lokal yang berada di kawasan tambang hidup bersama dan beririsan dengan aktivitas pertambangan. Penerimaan oleh komunitas lokal ini memiliki persepsi atau cara pandang berbeda dalam memaknai kehadiran perusahaan tambang, ada kesadaran dan rasionalitas tersendiri yang mempengaruhi cara pandang terhadap perusahaan tambang, ada proses interaksi yang terjadi antara komunitas lokal dengan perusahaan tambang yang menginternalisasi nilai-nilai dan harapan baru dengan hadirnya perusahaan tambang.

Kedua; dinamika kehadiran perusahaan tambang di suatu wilayah mutlak mempengaruhi perubahan struktur ruang fisik, ruang sosial, ruang ekonomi dan ruang budaya, struktur dan relasi. Pada konteks ini, cara pandang budaya komunitas lokal memaknai dan melakukan praktek-praktek budaya pada sebuah ruang baru yakni kawasan tambang. Masyarakat atau subjek dalam komunitas sebagai entitas budaya mengembangkan praktek budaya dan praktik sosial sebagai respon budaya terhadap ruang baru yaitu aktivitas tambang dan kawasan tambang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.

Ketiga; dalam rangka eksistensi komunitas lokal sebagai suatu kolektif yang mampu menaikkan posisi tawar dalam relasi dengan perusahaan tambang. Kemampuan subjek maupun kolektif mengakumulasi modal sosial, budaya, ekonomi

dan politik digunakan untuk menekan dan menegosiasikan kepentingan individu maupun kolektif. Hal ini menunjukkan bahwa subjek maupun komunitas lokal tidak selamanya berada pada posisi yang lemah dengan tekanan kekuasaan perusahaan tambang tapi sebaliknya mereka memiliki kekuatan dan kekuasaan secara individu dan berjejaring dalam kelompoknya mampu memosisikan diri dan kolektifnya sebagai kekuatan yang harus dipertimbangkan dalam rencana kegiatan pertambangan oleh perusahaan. Komunitas lokal Bahodopi sebagai sebuah entitas budaya melihat kawasan tambang dan dinamikanya sebagai ruang baru yang potensial dan selalu menciptakan peluang dan akses terhadap ruang baru.

Permasalahan diatas dijelaskan dengan perspektif studi etnografi. Studi etnografi mampu menjelaskan tentang realitas dinamika masyarakat atau komunitas lokal di kawasan tambang yang sedemikian kompleks (termasuk konflik) dan menjadi bagian dari solusi permasalahan kepada semua pihak yang ada di dalam kawasan lingkaran tambang Bahodopi. Asumsi dari hasil studi-studi yang telah dilakukan bahwa masuknya perusahaan tambang berdampak pada kondisi sosial dan budaya pada masyarakat. Komunitas yang berada di kawasan tambang sebelumnya merupakan masyarakat agraris bertransformasi menjadi masyarakat industri. Kehadiran perusahaan juga menciptakan persaingan antara penduduk lokal dan penduduk pendatang, terjadi proses komodifikasi lokalitas oleh elit lokal untuk melegitimasi keberadaan pekerja pendatang. Komunitas yang sebelumnya bertani, kini menggunakan ruang-ruang produksi lama atau melakukan modifikasi dari ruang produksi lama, lahan pertanian dan lahan permukiman menjadi aset, dan bangunan yang dimilikinya dijadikan komoditi sehingga menambah nilai ekonomi. Bahkan lebih jauh dari itu, etnografi mampu menjelaskan dibalik realitas yang sebagai bentuk kedalaman pemerian kebudayaan atau representasi.

Kekuatan studi etnografi terletak pada deskripsi mendalam (*thick description*) dan metode partisipasi observasi yang dilakukan dengan belajar dan hidup peneliti atau etnografer dan informan (*the self dan the other*). Geertz (1993) menekankan bahwa deskripsi mendalam (*thick description*) meliputi beberapa hal seperti: (1) bersifat interpretatif, (2) apa yang hendak ditafsirkan adalah sebuah diskursus sosial yang selalu mengalir, (3) usaha penafsiran adalah usaha penyelamatan sebuah diskursus dari kebinasaan (dengan mencatatnya, memotretnya, dan menuliskan) dan membuatnya mungkin untuk dilihat kembali, dan (4) deskripsi etnografis bersifat mikroskopik.

Studi etnografi yang digunakan untuk menjelaskan kebudayaan dengan latar belakang perubahan budaya dari masyarakat yang mengelola lingkungan alam yang beralih kepada industri khususnya di kawasan tambang seperti di Bahodopi. Berbagai perubahan yang tampak seperti perubahan ekologis, perubahan orientasi produksi ekonomi, perubahan struktur dan relasi sosial, perubahan sistem tata nilai budaya, perubahan pemahaman, sikap dan perilaku (tata cara) kehidupan pada ruang baru yakni kawasan tambang.

Pemahaman, sikap dan tata cara kehidupan sebagai sebuah aspek kebudayaan ini yang perlu dijelaskan kembali sebagai bentuk pemahaman baru terhadap subjek dan kolektif (komunitas) seiring dengan perubahan yang terjadi. Perspektif ini saya gunakan untuk memahami komunitas lokal yang bermukim di kawasan tambang Bahodopi sebagai entitas budaya yang mengembangkan pola-pola baru sebagai respon budaya (mekanisme adaptatif) dari perubahan-perubahan yang muncul dengan keberadaan perusahaan tambang. Pada penjelasan ini akan terurai sistem nilai dan budaya apa yang bertahan, mengalami perubahan dan mengalami pergeseran ataupun menjadi hilang.

Perspektif yang saya bangun dalam penelitian ini, melihat bahwa kawasan tambang merupakan sebuah ruang baru yang tercipta dari konsekwensi masuknya perusahaan dan melakukan aktivitas tambang. Penguasaan kawasan tambang dan pembatasan akses terhadap sumber daya didalamnya oleh perusahaan pemilik izin usaha pertambangan menjadi permasalahan yang terjadi secara umum di wilayah yang yang diberikan izin oleh pemerintah terutama jika terdapat kelompok masyarakat yang bermukim dan memanfaatkan kawasan tambang sebagai ruang hidup/tempat tinggal dan ruang produksi ekonominya.

Seperti yang disinggung dalam studi-studi yang rujuk diatas bahwa terjadi ketimpangan dan ketidakadilan, proses pemiskinan dan penyingkiran komunitas lokal, aktifitas pertambangan yang menghilangkan sumber penghidupan utama masyarakat lokal sehingga terjadi perlawanan dan penolakan terhadap perusahaan tambang. Tapi faktanya, bahwa dalam beberapa wilayah kawasan tambang masyarakat lokal masih bertahan dan tetap eksis walaupun mengalami tekanan-tekanan secara langsung perusahaan seperti usaha penyingkiran komunitas dari kawasan tambang, ataupun tekanan dari dampak adanya kegiatan pertambangan dalam wilayah tersebut yang rentan dan mengancam keselamatan komunitas lokal seperti bencana banjir karena perubahan ekologi akibat tambang yang merusak harta benda dan faktor-faktor produksi ekonomi, timbulnya penyakit akibat pencemaran lingkungan dari limbah tambang serta ketidaknyamanan dalam lingkungan permukiman masyarakat yang terganggu dengan aktifitas tambang seperti kebisingan pabrik dan lalu lintas.

Situasi demikian juga terjadi dan dialami oleh komunitas lokal di kawasan tambang Bahodopi, namun kecenderungan komunitas lokal untuk memilih bertahan dan menjadi bagian dari aktifitas tambang walaupun konsekwensi ancaman dari dampak aktifitas pertambangan juga terjadi karena aktifitas tambang. Komunitas lokal yang memaknai kawasan tambang sebagai ruang baru berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, melakukan perubahan-perubahan dan penyesuaian dalam sistem sosial (struktur), kelembagaan dan nilai-nilai baru dari migran maupun budaya perusahaan dan industri, termasuk juga terciptanya ruang-ruang lainnya. Ruang-ruang yang ada sudah mulai diproduksi dan bernilai ketika perusahaan masuk ke kawasan tambang dan diikuti dengan kelompok urban, baik pekerja tambang maupun pekerja sektor informal ke Bahodopi.

Keberadaan ruang pada dasarnya memiliki nilai politik, karena keberadaan ruang menjadi salah satu yang dipertaruhkan dan diperjuangkan oleh kelas yang memiliki modal dan ruang memiliki nilai sosial ekonomi, serta ruang memiliki ciri khas yang dapat diambil dan digunakan oleh para pemilik modal untuk direproduksi. Reproduksi ruang di wilayah lingkaran tambang tidak terlepas dari tiga hal seperti pemikiran dari Lefebvre, (1991) yaitu praktik spasial, representasi ruang dan ruang representasi. Praktik spasial oleh masyarakat yang ada di wilayah tambang seperti cara pihak luar (perusahaan dan pendatang) untuk mendapatkan ruang milik komunitas lokal dengan cara membeli dan menyewa. Terjadinya praktik spasial menyebabkan pendatang memperoleh peluang (ruang) untuk ruang produksi ekonomi. Kebutuhan akan lahan atau tanah untuk tempat tinggal dan tempat usaha oleh pendatang menjadi salah satu penyebab tingginya harga jual ataupun sewa lahan/tanah. Masyarakat lokal menjual lahan/tanah yang dimilikinya kepada pendatang atau menyewakannya dengan harga diatas nilai jual dari pemerintah. Praktik spasial masyarakat pendatang dengan komunitas lokal mengalami pergeseran meliputi ruang, ekonomi dan kemampuan.

Masuknya perusahaan tambang yang menerima tenaga kerja diikuti masuknya pekerja pendatang dari berbagai wilayah menyebabkan kawasan Bahodopi sebagai ruang representasi yang ada pada komunitas lokal mengalami perubahan. Ruang representasi komunitas lokal yang dulunya adalah ruang bermukim dan rumah sebagai tempat hunian beralih fungsi menjadi komoditi berupa penyewaan lahan usaha, rumah sewa dan kamar kos yang disewakan kepada pekerja dan pendatang. Kawasan dan lahan pertanian yang digunakan sebagai sumber mata pencaharian mencirikan masyarakat agraris berubah menjadi kawasan tambang dengan ciri masyarakat industri. Representasi ruang yang berawal dari praktik spasial menyebabkan mengalami ruang representasi baru yang diciptakan oleh kelompok dominan.

Produksi ruang dapat menyebabkan terjadinya konflik diantara para pemilik ruang asal dengan pemilik ruang baru. Sebagaimana komunitas lokal dengan perusahaan tambang dan masyarakat pendatang, kegiatan produksi ruang yang terjadi dalam tiga hal yakni praktik spasial, ruang representasi, dan representasi ruang yang terjadi antara komunitas lokal dan pendatang yang menjadikan ruang sebagai cara utama untuk melakukan produksi dan reproduksi. Argumen dalam pemikiran Lefebvre, (2008) yang mana harus menggeser pemikiran Marx tentang ranah produksi ke ranah ruang karena ruang menjadi jembatan utama untuk menumbuhkan akumulasi kapital yang dapat menciptakan persaingan dan dapat diperjuangkan.

Dalam dinamika hubungan perusahaan tambang dan komunitas lokal, bahwa komunitas lokal cenderung mengakumulasi modal sosial dan budaya untuk melakukan akses terhadap ruang-ruang baru (pertambangan) dengan menggunakan identitas lokal seperti etnis, agama, kultur dan sejarah sebagai basis identitas lokal untuk mempengaruhi hubungan masyarakat (komunitas lokal) dengan perusahaan. Rekonstruksi identitas budaya dari yang bersifat generik ke arah diferensial untuk menegaskan bahwa betapa dekatnya kebudayaan dalam kehidupan manusia. Bahwa komunitas lokal mampu memilih dan mengembangkan strategi budaya baru dalam memahami perubahan ruang. Rekonstruksi identitas tersebut dalam rangka memperkuat posisi tawar komunitas lokal kepada perusahaan tambang maupun kepada kelompok pekerja pendatang dalam ruang baru pertambangan. Posisi publik yang menjadi pendukung kebudayaan terpecah ke dalam sub-kebudayaan ataupun struktur baru untuk menjamin kepastian terakomodasinya kepentingan individu dan kolektif. Pada saat yang sama juga terjadi replikasi identitas tidak didasarkan pada lokalitas pada kepentingan yang sama dari orang-orang yang memiliki sejarah dan asal-usul yang berbeda (Abdullah, 2006) yang mengintegrasikan komunitas lokal maupun pendatang dalam ruang baru yaitu kawasan tambang.

1.2. Permasalahan Penelitian.

Mengacu pada realitas yang saya sampaikan di atas, maka fokus penelitian yang dijelaskan dalam permasalahan berikut:

1. Bagaimana komunitas lokal memaknai ruang baru yang mempengaruhi kehidupan ekologis dan dinamika sosial, ekonomi dan budaya mereka?
2. Bagaimana dinamika komunitas lokal mempengaruhi perubahan ruang, struktur dan relasi sosial?
3. Bagaimana perubahan ruang, struktur dan relasi sosial digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan komunitas lokal?

1.3. Tujuan Penelitian.

Penelitian bertujuan untuk menjelaskan kondisi komunitas lokal di kawasan tambang yang telah mengalami perubahan sebagaimana penelitian ini dilakukan yaitu:

1. Menjelaskan dan menganalisis pemaknaan baru oleh komunitas lokal terhadap wilayah dan aktivitas tambang sebagai ruang hidup baru yang mempengaruhi hubungan ekologis, sosial, ekonomi dan budaya pada komunitas lokal.
2. Menjelaskan dan menganalisis berbagai proses sosial yang terjadi sebagai dinamika komunitas lokal pada ruang baru yang membentuk perubahan ruang sosial, struktur, dan relasi termasuk menjelaskan perubahan dan pergeseran nilai-nilai dalam ruang yang baru sebagai hasil kompromi dan penerimaan sebagai bentuk *re-order* dalam ruang baru yang majemuk dan kompleks.
3. Menjelaskan dinamika komunitas lokal menggunakan modal sosial budaya dan politik untuk mengakses ruang ekonomi baru bagi mereka sebagai ajang kontestasi dan menegosiasikan kepentingan melalui dialog sebagai ruang sosial dari para pihak yang memiliki kepentingan dengan keberadaan perusahaan tambang. Bagaimana peluang dan strategi yang dilakukan oleh subjek maupun kolektif pada komunitas lokal di kawasan tambang, mengakses ruang baru dalam aktivitas pertambangan maupun ruang-ruang di luar aktivitas pertambangan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini menawarkan perspektif, konsepsi dan makna yang berbeda dalam melihat aktivitas pertambangan sebagai ruang baru dengan dinamikanya. Pendekatan etnografi lebih menekankan pada cara pandang komunitas lokal (*native*) yang berbeda terhadap aktivitas tambang yang secara berimbang baik mereka yang terlibat langsung maupun yang tidak. Cara pandang ini menggambarkan sisi *nature* (alamiah) kondisi masyarakat atau komunitas lokal yang hidup dan eksist di kawasan tambang sebagai sebuah entitas budaya. Sebuah pemerian kebudayaan yang mengalami dinamika (perubahan) dengan berbagai pengaturan sosial dan budaya yang diadaptasikan sehingga komunitas lokal atau masyarakat pendukung kebudayaan tetap *survive*.

Implikasi teoritisnya sebagai sebuah pemerian atau deskripsi etnografi menggambarkan sebuah sub kebudayaan berbeda dari pola-pola budaya dan sistem sosial yang dominan. Studi etnografi menggambarkan kebudayaan tidak lagi berlaku umum, melainkan berbeda (*liyan*) seperti dalam komunitas di kawasan tambang Bahodopi menjadi *the others* diantara entitas budaya lain yang dominan.

Secara praktis, studi ini memberikan manfaat kepada pemerintah pusat dan daerah serta pelaku usaha investasi (perusahaan) tambang yang bekerja di wilayah Bahodopi memahami situasi masyarakat atau komunitas lokal dan kebudayaan masyarakat setempat dan dinamikanya. Bagi pemerintah pusat dan daerah yang menjembatani hubungan masyarakat (komunitas lokal) dengan perusahaan dapat menjadi rujukan dalam memahami dan komitmen keberpihakan kepada masyarakatnya dan perusahaan secara objektif dan berimbang. Bagi perusahaan yang melakukan investasi pertambangan di kawasan tambang Bahodopi, hasil studi ini dapat menjadi referensi untuk membangun hubungan baik dengan komunitas lokal di kawasan tambang baik yang terlibat dengan aktivitas pertambangan secara langsung atau tidak langsung, maupun yang memiliki aktivitas yang tidak berhubungan dengan tambang terkait dengan kenyamanan dan keamanan investasi.

Secara substansial, stakeholder kebijakan dalam aktivitas tambang seperti pemerintah pusat dan daerah serta perusahaan yang berhadapan langsung dengan

komunitas lokal dengan kepentingan yang berbeda. Cara pandang yang berbeda ini kemudian menjadikan situasi tidak kondusif bagi masyarakat (komunitas lokal) yang selalu berada pada posisi yang sub-ordinat dari para pihak yang dominan yang dapat berakibat menjadi konflik. Pemahaman yang utuh tentang masyarakat oleh stakeholder kebijakan melalui studi etnografi ini dapat menjadi pelajaran untuk memahami perbedaan cara pandangan dan kepentingan para pihak sehingga titik temu tercipta berupa pengaturan sosial baru yang diterima dan disepakati oleh pihak masyarakat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Studi dan Kajian Pada Masyarakat di Kawasan Tambang

Banyak studi dan kajian yang membahas tentang hubungan masyarakat dengan kegiatan pertambangan dengan berbagai perspektif dan teori tertentu. Praktek ekstraktif sumberdaya alam ini menjadi bahan tulisan akademisi, praktisi non pemerintah seperti NGO, lembaga konsultan karena terjadi proses yang dinamis dalam proses tumbuhkembangnya suatu daerah industri. Di sisi lain, setiap perusahaan tambang yang akan beroperasi pasti memulai dengan sejumlah kajian semi akademik untuk tujuan praktis perencanaan kegiatannya seperti AMDAL, Study Social Analysis Impacts, maupun melakukan pemahaman kondisi sosial budaya masyarakat dimana perusahaan beroperasi untuk keamanan investasi dan bekerja. Studi yang dilakukan oleh akademisi, peneliti, dan praktisi dalam negeri maupun di luar negeri, lokasi dan fokus studinya pada masyarakat dan kawasan tambang menjadi objek kajiannya dengan berbagai perspektif berbeda.

2.1.1. Studi Tentang Tambang dan Perubahan Ekologi.

Beberapa studi tentang perubahan ekologis yang terjadi karena aktivitas pertambangan dalam lingkungan ekologis manusia. Relasi manusia dengan lingkungan ekologi digunakan sebagai ruang hidup dengan menetap dan memanfaatkan potensi sumber daya dalam lingkungan ekologi untuk pemenuhan kebutuhan hidup dalam kurun waktu yang lama secara teratur. Kehadiran perusahaan tambang dan aktivitas pertambangan merubah orientasi ruang ekologis masyarakat, kemudian memunculkan masalah ekologis yang baru seperti bencana diakibatkan karena kerusakan lingkungan.

Kerusakan ekosistem di Bahodopi karena aktivitas pertambangan oleh banyak perusahaan seperti dijelaskan dalam studi Andika (2014) bahwa sejarah pertambangan nikel di Morowali perkembangan dan perubahannya dan dampaknya terhadap lingkungan ekologi sekarang ini. Pertambangan nikel di Morowali diawali dengan keberadaan dua perusahaan rakasasa tambang penanaman modal asing (PMA) yaitu PT. INCO dan PT. Rio Tinto sejak 1976 dengan izin kontrak karya. Dalam perkembangan aktivitas pertambangan baru mulai berkembang pasca diterbitkannya UU No. 4 Tahun 2009. Kegiatan pertambangan nikel yang sebelumnya hanya sejumlah perusahaan mengurangi (menciutkan) luasan wilayah konsesi sesuai dengan undang-undang.

Alasan otonomi menjadi dasar Bupati Morowali mengeluarkan perizinan tambang sehingga di Morowali beberapa perusahaan tambang baru memperoleh izin dan melakukan aktivitas penambangan material nikel mentah (ore') seperti PT. Sulawesi Mining Investment (SMI) pada tahun 2010, PT. Bintang Delapan Mineral (BDM) bekerja sama PT. Tsingshan (PT. Dingxin Group); PT. Mulia Pacific Resources Tbk (anak perusahaan PT. Central Omega Resources) dengan luas 5.156 hektar. Praktek menambang pada masa awal berupa produksi bahan mentah (ore') yang diekspor ke China untuk kebutuhan industri. Dampak pemberian izin kemudian menyebabkan terjadi tumpang tindih kepentingan lahan muncul di Blok Bahodopi. PT. Rio Tinto dan PT. Inco (PT. Vale) sebagai pemilik kontrak karya

bersengketa dengan Bupati Morowali akibat terbitnya 43 IUP di atas lahan kontrak karya PT. Inco, sementara lahan milik PT. Rio Tinto telah diduduki oleh IUP PT. Bintang Delapan Mineral. Dari sejumlah perusahaan itu, beberapa perusahaan sudah melakukan aktivitas prakonstruksi saat itu seperti PT. Sulawesi Resources, GSMI, Bintang Delapan Mineral, PT. PAN China, GMU, CMPP dan CV. Resky Utama. Praktek menambang yang mengambil bahan mentah dengan cara membuka lahan hutan menyebabkan tutupan hutan terbuka sehingga merusak ekosistem hutan. Dampak yang ditimbulkan adalah pada kerusakan lingkungan yang berpotensi bencana yang dialami oleh masyarakat yang berada di kawasan tambang seperti rusaknya lahan pertanian, hilangnya kesuburan tanah, polusi udara dan banjir.

Studi yang dilakukan oleh JATAM (2015) menyebutkan bahwa aktivitas pemenuhan kebutuhan oleh masyarakat Bahodopi mulai sulit seiring berkembangnya kawasan tambang. Perubahan ekologi menyebabkan aktivitas mata pencaharian utama yang memanfaatkan potensi sumber daya alam seperti pertanian menjadi sulit karena lahan sawah dan perkebunan rusak, tidak subur karena endapan pasir dan lumpur banjir. Kondisi yang sama dialami oleh nelayan pesisir Bahodopi terpaksa menghentikan aktivitas kenelayanannya karena pencemaran laut dan pantai merusak habitat ikan. Kondisi ini membuat rawan dan terancamnya kondisi kehidupan nelayan lokal di Bahodopi karena sumber penghidupan utama yang hilang karena aktivitas tambang.

Perubahan ekosistem terkait peristiwa banjir terkait kawasan tambang dalam studi Lahay, (2023) menyebutkan bahwa tingginya intensitas bencana banjir di kawasan tambang karena kerusakan hutan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan. Pada saat musim hujan, volume air lebih banyak menyebabkan banjir membawa material dan lumpur menggenangi lahan sawah. Banjir menyisakan endapan lumpur merah dan pasir menyebabkan tanah sawah tidak subur. Dampak terparah saat banjir tahun 2019 yang menggenangi desa-desa di kawasan Bahodopi bahkan merusak infrastruktur seperti jembatan. Bencana banjir penyebabnya adalah karena hutan yang menjadi penyangga air telah gundul karena aktivitas pertambangan dan mengalirkan air dengan jumlah debit yang besar terutama pada musim hujan. Data Global Forest Watch menunjukkan bahwa pada periode 2002-2021, hutan primer basah di Sulawesi Tengah berkurang seluas 370.000 hektar atau setara 51% dari kehilangan tutupan pohon. Sulawesi Tengah kehilangan 745.000 hektar tutupan pohon dan atau setara penurunan 13% tutupan pohon sejak 2000. Dari jumlah itu, kontribusi paling besar adalah kabupaten Morowali yang kehilangan 149.000 hektar tutupan pohon. Banjir yang terjadi karena rusaknya hutan yang berfungsi menahan air dan kegiatan pertambangan memberikan kontribusi yang paling besar (Lahay, 2023)

Studi di wilayah pertambangan tentang perubahan ekologi yang berdampak pada kehidupan komunitas lokal seperti Ambo Upe dkk (2018) menjelaskan resiko-resiko yang dihadapi oleh masyarakat di kawasan tambang emas Bombana. Pertambangan emas berdampak pada aspek kehidupan manusia dan lingkungan, yaitu dampak ekologis dan sosial ekonomi. Kompleksitas permasalahan menyebabkan kondisi yang berisiko pada masyarakat. Pemanfaatan potensi sumber daya alam tak terbarukan dilakukan secara maksimal melalui peningkatan eksploitasi sumber daya alam menyebabkan kehidupan perekonomian masa depan yang tidak pasti pada masyarakat, hanya berlaku pada kelas atas. Dampak proses eksploitasi sumberdaya alam menyebabkan kerusakan sistem ekologi dan mengancam kehidupan masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sumberdaya alam. Aktivitas pertambangan tidak hanya merusak hutan tetapi juga lahan tanah

terkait usaha pemulihan kondisi lahan tanah pasca menambang. Studi Prematuri et al., (2020) tentang kesuburan lahan hutan pada aktivitas pertambangan nikel yang dilakukan secara terbuka berpengaruh terhadap sifat kimia tanah. Berkurangnya kesuburan tanah pasca tambang mengakibatkan pertumbuhan spesies pohon tropis seperti *F. moluccana* dan *A. saman* yang tumbuh lebih rendah. Kondisi tanah pasca pertambangan nikel mengandung TN, TC, P, CEC, dan konsentrasi Ca dan Na yang dapat ditukar menurun masing-masing sebesar 98%, 93%, 11%, 62%, 85%, dan 74%, dibandingkan dengan tanah hutan alam, PH tanah pasca tambang lebih tinggi dari tanah hutan alam.

Dampak pertambangan terhadap ekosistem pertanian seperti digambarkan oleh Salim, (2016) terkait ketahanan pangan (food security) dan kedaulatan pangan (food sovereignty) akibat tambang batubara di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Perusahaan tambang menghancurkan ratusan hektar sawah milik petani karena rusaknya irigasi dan limbah batubara. Tanggung jawab perusahaan tambang terhadap kerusakan sawah-sawah milik masyarakat tidak diperbaiki oleh perusahaan dan Pemda pasca menambang. Pencemaran limbah dan sedimen menyebabkan padi tidak mendapat suplai air sehingga padi warga mengalami kerusakan seperti layu, menghitam dan beresiko gagal panen.

Tulisan Maloko (2014) menjelaskan tentang kerusakan lingkungan alam di Halmahera Maluku Utara akibat pertambangan nikel oleh perusahaan tambang. Eksploitasi tambang nikel di Halmahera Timur oleh PT. Antam Tbk yang dilaksanakan oleh perusahaan sub-kontraktor seperti di Tanjung Buli, Pulau Gee, Tanjung Moronopo dan Pulau Pakal. Pada tahun 2010 izin usaha pertambangan oleh pemerintah daerah Halmahera Timur sebanyak 15 IUP dengan luas konsesi 54.328,1 hektar. Di wilayah Halmahera Tengah pertambangan nikel dimulai sejak 1988 oleh PT. Weda Bay Nikel dan PT. Antam Tbk. di Pulau Gebe sejak 1978 -2003 dengan luas konsesi 76.280 hektar. Pada tahun 2010, perusahaan tambang nikel yang memegang IUP sebanyak 18 perusahaan dan 1 perusahaan pemegang kontrak karya yaitu PT. Weda Bay Nikel melakukan penambangan dan membangun pabrik pengolahan (smelter) di Halmahera Timur, Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan.

Pertambangan nikel di Halmahera berdampak pada ketahanan dan kerentanan pangan masyarakat. Berbagai masalah ekologi yang dihadapi seperti ketersediaan pangan dan air bersih, hilangnya mata pencaharian komunitas nelayan ikan teri teluk Buli di desa Wailukum, Soa Gimalaha, Sangadji (Maba), Soa Laipo, Soa Sangadji (Maba Pura), punahnya doro-doro sagu di bagian hilir bukit karena kekurangan air sehingga tumbuhan sagu kering dan mati. Masyarakat di Halmahera mengkonsumsi beras yang didatangkan dari Tobelo dan daerah transmigrasi di Wasile karena sumber pangan sagu sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Dalam pemenuhan kebutuhan protein yang diperoleh dari laut, air laut yang keruh akibat tambang nikel terutama di pesisir merusak ekosistem tempat ikan berkembang biak. Nelayan harus melaut ke samudra luas dan beresiko karena teknologi alat tangkap dan perahu yang sederhana serta biaya bahan bakar mahal. Perubahan mata pencaharian yang sebelumnya bergantung pada sumberdaya alam di laut tidak berlanjut dan akhirnya memutus rantai produksi pangan masyarakat di Teluk Buli. Hilangnya sumber-sumber laut membuat banyak orang bekerja sebagai buruh lepas di perusahaan tambang walaupun memperoleh penghasilan namun status ketenagakerjaan tidak jelas (Maloko, 2014).

Gambaran kerusakan ekosistem laut karena perusahaan tambang seperti studi Sarianto dkk, (2016) tentang padatan tersuspensi di perairan Halmahera Timur

berada di atas NAB yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu kecil dari 25 mg/l. Sedangkan rata-rata kandungan MPT di perairan Halmahera Timur berada di atas 25 mg/l terkecuali di Wasile. Kandungan nikel di perairan telah mendekati nilai ambang batas yang berarti nikel telah berdampak terhadap perairan. Perubahan kualitas perairan telah memberi dampak pada terdegradasinya ikan di perairan di mana ikan yang ditangkap dengan alat tangkap bagan mengalami perubahan ukuran. Perubahan ukuran pada ikan teri dan cumi-cumi yang ditangkap karena pengoperasian bagan berada di kawasan pesisir yang telah mengalami tekanan dari aktivitas pertambangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa nikel memberikan pengaruh yang besar terhadap penurunan kualitas perairan dan penurunan ukuran ikan layak tangkap pada alat tangkap bagan.

Studi Syarifuddin, (2022) melihat kondisi lingkungan maritim Morowali dengan meningkatnya aktivitas tambang nikel. Lebih dari 20 perusahaan tambang dan pengolahan nikel beroperasi di IMIP dengan mengolah jutaan ton hasil tambang. Manajemen pembuangan limbah/tailing (lumpur sisa ekstraksi bijih nikel) dilakukan kurang optimal. Tailing rentang mengalami upwelling dan dapat menyebabkan sedimentasi yang meluas. Meskipun limbah diolah untuk menurunkan kadarnya di bawah ambang batas yang disarankan, cemaran logam berat tersebut dapat terakumulasi pada biota laut yang dapat memicu biomagnifikasi dalam rantai makanan ekosistem laut. Dampak nyata dari pembuangan limbah adalah sedimentasi pesisir laut Morowali. Hutan mangrove dan laut pesisir Morowali yang menjadi rumah bagi sumber daya perikanan rusak mengakibatkan nelayan mengalami penurunan pendapatan.

Studi Fitriani et al., (2021) tentang pencemaran lingkungan laut akibat tambang nikel di Pomalaa menurutnya bahwa sistem penambangan terbuka (open cut mining) beresiko terhadap pencemaran laut. Sistem tambang terbuka menyebabkan besarnya volume material yang akan masuk ke perairan. Volume tanah yang besar akan berdampak negatif pada siklus hidrologi, peningkatan erosi tanah yang sangat besar dan sedimentasi, penurunan kualitas perairan serta gangguan terhadap biota laut. Kerusakan lingkungan ekologi juga menimbulkan permasalahan terkait dengan kualitas kesehatan masyarakat. Mauliyana dkk (2022) menyebutkan bahwa rusaknya hutan dan pencemaran udara yang bersumber dari proses pembakaran dan pengolahan bijih nikel menjadi ancaman bagi masyarakat di kawasan tambang. Pembakaran bijih nikel menghasilkan unsur kimia berbahaya seperti zat timbal dimana paparan timbal yang berlebihan dapat menimbulkan risiko anemia dan gangguan kinerja saraf dan otak. Pohon di hutan atau tanaman yang seharusnya menyerap karbon atau zat timbal karena pembakaran nikel namun ditebang untuk tujuan menambang. Akibatnya polusi udara menyebar dan dihirup oleh orang yang berada di kawasan tambang dan berisiko menimbulkan penyakit seperti risiko anemia akibat paparan polutan.

Studi Astuti (2022) menyebutkan bahwa degradasi lingkungan terjadi pada masyarakat yang bermukim di kawasan tambang. Polusi udara karena debu menyebabkan resiko terkena penyakit pernapasan, mengganggu kenyamanan perjalanan dan jarak pandang sehingga potensi kecelakaan lalu lintas tinggi. Pencemaran air dengan mineral berat menyebabkan ketidakstabilan komponen-komponen dalam tanah sehingga perlu dilakukan penanganan tertentu untuk menghindari dampak ini. Air menjadi ancaman karena kemampuan air memasuki celah tanah membawa zat-zat beracun berbahaya. Ketika terkontaminasi dengan mineral berat, air menjadi beracun dan berwarna merah dan dapat merusak apapun

yang dilaluinya seperti tanah, tumbuhan, dan binatang mengalami kondisi rusak dan mati.

Dampak ekologi pertambangan Amerika seperti yang digambarkan oleh Jerrold, (1997) menggambarkan pentingnya tambang di Amerika namun sejumlah konsekuensi terjadi akibat pertambangan. Industri pertambangan di Amerika sebelum perang revolusi sangat penting dalam kesejahteraan ekonomi dan keamanan nasional Amerika Serikat. Biaya pengembangan tambang di masa lalu tinggi sehingga banyak operator tambang mengabaikan konsekuensi lingkungan yang rusak dari kegiatan tambang. Aktivitas tambang dapat diterima secara hukum dan secara moral., namun tingkat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh beberapa operasi penambangan diketahui setelah lokasi penambangan ditutup, dan operator tambang telah menghilang dari tempat kejadian. Permasalahan lingkungan yang serius di masa lalu seperti tumpukan tailing radioaktif, merkuri dan logam berat (dasar) beracun lainnya memasuki rantai makanan, kebocoran dan kegagalan bendungan tailing, invasi dan penipisan akuifer, penurunan permukaan tanah dan gua, drainase tambang, asam yang mempengaruhi area yang luas, dan tambang terbungkalai yang membutuhkan perbaikan lingkungan. Dalam beberapa kasus, kerusakan lingkungan dari penambangan yang sedang berlangsung atau yang baru ditambang seperti di Summitville Colorado. Sekitar 5% situs Superfund terdampak dengan industri pertambangan.

Tulisan Holden (2005) menggambarkan perlawanan masyarakat sipil terhadap pertambangan logam non ferrous di Philipina sebagai respons terhadap tumpahan limbah tambang Marcopper pada tahun 1996. Mobilisasi masyarakat sipil menentang industri pertambangan logam non-ferrous seperti protes, kampanye, protes terhadap IPRA dan putusan pengadilan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang yang memfasilitasi kepemilikan 100% investor asing dalam proyek pertambangan dan pelarangan total pertambangan oleh pemerintah.

Studi yang dilakukan oleh Mc Guire, (2003) menjelaskan risiko penutupan hasil berkelanjutan yang diperoleh melalui proses komite pengarah penutupan tambang Kelian serta metode yang digunakan untuk mengembangkan dan mendukung solusi berkelanjutan. Tambang emas Kelian di Kalimantan Timur sejak tahun 1990-1992 dan dijadwalkan untuk menyelesaikan operasi penambangan dan pengolahan (closing) pada tahun 2004. Berhentinya aktivitas pertambangan akan berdampak pada masyarakat sekitar yang telah mendapat manfaat dari pekerjaan, terutama kegiatan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang telah dihasilkan oleh tambang. PT. Kelian Equatorial Mining (KEM) pada bulan Oktober 2000 memulai menjalin kemitraan dengan masyarakat dan pemerintah untuk mengeksplorasi opsi pasca-penutupan yang berkelanjutan untuk lokasi tambang dan program pengembangan masyarakat.

Strategi penutupan tambang Kelian mengupayakan keterlibatan pemangku kepentingan melalui Komite Pengarah Penutupan Tambang Kelian (MCSC) dalam mengembangkan solusi berkelanjutan yang memungkinkan masyarakat mendapatkan manfaat jangka panjang dan meminimalkan risiko pasca-penutupan dari operasi KEM. Komite pengarah melibatkan pemerintah daerah, perusahaan, masyarakat sipil, NGO membangun kesepahaman, membangun situs web untuk informasi dan menyusun indikator evaluasi untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi kegiatan.

2.1.2.Studi Tentang Tambang dan Kehidupan Ekonomi.

Tulisan Rahman (2014) menggambarkan hubungan komunitas adat Karunsi'e yang berkonflik dengan perusahaan tambang sejak tahun 1970an. Kegiatan eksplorasi pertambangan nikel oleh perusahaan telah melanggar hak masyarakat seperti penguasaan lahan atas hak masyarakat Adat To Karunsi'e yang berdampak pada kemiskinan. Komunitas adat kehilangan sumber-sumber penghidupan seperti sawah, kebun dan pemukiman karena dimasukkan dalam wilayah kontrak karya perusahaan tambang oleh pemerintah. Pranata ekonomi dan pranata sosial masyarakat adat Karunsi'e rusak akibat dari kegiatan pertambangan sehingga termarginalkan dan tidak memiliki akses terhadap sumberdaya alam dan lahan untuk keberlangsungan hidup dan mempertahankan eksistensinya. Penguasaan tanah dan sumberdaya alam masyarakat adat Karunsi'e oleh pihak PT. INCO melalui kontrak karya pertambangan oleh pemerintah mengeksklusi dan atau membatasi akses masyarakat terhadap tanah dan sumber daya alam mereka. Hal itu berdampak pada hilangnya sumber penghidupan dan berakibat pada pemiskinan terhadap masyarakat adat serta terjadinya proses penghancuran secara radikal atas identitas mereka sebagai orang Karunsi'e turun temurun hidup di sekitar pegunungan dan pinggiran danau Matano.

Kustiana Ayu dkk, (2016) menjelaskan kondisi masyarakat di sekitar kawasan tambang dalam perspektif ekonomi menggunakan indikator kesempatan kerja, pendapatan, konsumsi bahan makanan dan tabungan. Perubahan terjadi dengan keberadaan perusahaan tambang pada masyarakat Bahodopi. Perubahan pendapatan dan belanja keluarga mengalami peningkatan berkorelasi dengan pendapatan keluarga yang meningkat bagi keluarga yang bekerja di perusahaan. Kondisi ekonomi yang cukup baik meskipun indikator kesempatan kerja belum optimal, namun terdapat peningkatan kesejahteraan masyarakat pasca pembukaan wilayah tambang. Sebagian besar masyarakat pendapatan di atas Rp. 1.700.000. Kondisi sosial masyarakat di kecamatan Bahodopi untuk tingkat pendidikan tertinggi yaitu sebesar 40 persen yang berada pada jenjang tingkat tamat SMA dan yang terendah pada jenjang tingkat tamat SD sebesar 5 persen. Studi yang dilakukan oleh Suriyani, (2019) menunjukkan dampak positif aktivitas tambang nikel terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. Perusahaan tambang menampung tenaga kerja dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Kesempatan kerja dijadikan acuan sebagai permintaan tenaga kerja terlihat mulai dari proses konstruksi sampai pada tahap produksi yang melibatkan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan sebagai tenaga kerja dan penerimaan tenaga kerja lebih mengutamakan masyarakat lokal. Pendapatan masyarakat meningkat dengan kehadiran pertambangan nikel dibandingkan sebelum masyarakat mengandalkan hasil kebun dan pertanian yang beresiko gagal panen. Masyarakat di sekitar wilayah pertambangan yang diterima bekerja dan memperoleh gaji tetap dari perusahaan. Perusahaan juga memberikan bantuan terhadap beberapa fasilitas seperti masjid, jalan, lampu penerangan dan sarana pendidikan. Pendapatan mereka sebelum bekerja di perusahaan tambang rata-rata sebesar Rp. 1.961.111,00,-, namun setelah adanya aktivitas pertambangan pendapatan meningkat rata-rata Rp 3.166.667,00,- per bulannya. Seiring peningkatan pendapatan diikuti dengan peningkatan belanja barang dan jasa oleh masyarakat. Peningkatan belanja terutama seperti kendaraan roda dua (motor), banyaknya peminat belanja online dan peningkatan belanja barang dan jasa lainnya.

Seiring dengan berjalannya aktivitas pertambangan nikel di wilayah ini, banyak masyarakat memanfaatkan peluang usaha tersebut untuk membuka usaha mikro seperti kios-kios berskala kecil seperti warung kelontong, warung makan pinggir, konter pulsa, industri kecil seperti pembuatan tempe, tahu, keripik dan sablon, usaha jasa seperti tukang cukur, tambal ban, bengkel motor dan penjahit, pengrajin cenderamata, usaha kayu dan anyaman, pertanian/peternakan seperti palawija, ayam buras, itik, lele, tambak ikan dan udang. Usaha kecil tersebut menguntungkan masyarakat dan karyawan tambang. Pedagang dapat menambah pendapatan mereka sehingga pemenuhan kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi, sedangkan dari para pekerja tambang dapat berbelanja di kios-kios terdekat untuk kebutuhan sehari-hari tanpa harus keluar jauh untuk membeli kebutuhannya. Peluang usaha lainnya adalah dengan menjadi rekanan perusahaan untuk menyediakan kebutuhan perusahaan sehari-hari dalam skala besar seperti usaha catering makanan yang untuk karyawan tambang dan air minum dan untuk usaha yang tidak dikontrak oleh perusahaan membuka ruang bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya seperti pembukaan kios-kios.

Perubahan oleh perusahaan tambang terkait ekonomi regional, studi Rosyid et al., (2020) tentang analisis dampak investasi terhadap perekonomian daerah di Provinsi Papua. Sektor pertambangan salah satunya dicirikan sebagai kegiatan padat modal. Biaya modal atau investasi oleh pemilik Izin Usaha Pertambangan mulai dari tahap penyelidikan umum sampai dengan beroperasinya kegiatan penambangan. Investasi secara umum akan berdampak kepada masyarakat sekitar ataupun daerah karena peningkatan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan meningkatkan taraf kemakmuran. Dalam hal investasi di bidang pertambangan studi ini mengevaluasi pengaruh investasi sektor pertambangan logam terhadap perekonomian di Provinsi Papua dengan menganalisis variabel-variabel seperti investasi, pertumbuhan PDRB umum provinsi, PDRB sektor pertambangan, PDRB sektor pertanian, PDRB sektor konstruksi, serta tenaga kerja pada sektor tersebut. Hasil studi menunjukkan bahwa investasi sektor pertambangan logam memberikan dampak yang positif terhadap PDRB Provinsi Papua, PDRB sektor pertambangan dan pertanian, serta nilai tambah dalam hal tenaga kerja di sektor pertambangan. Respon negatif diberikan oleh PDRB sektor konstruksi karena peningkatan investasi dan PDRB sektor pertambangan. Sektor konstruksi diindikasikan hanya memberikan dampak keterkaitan yang rendah kepada sektor yang lain dilihat dari kontribusi PDRB sektor tersebut terhadap pembentukan PDRB sektor pertanian yang rendah dan respon yang rendah dari PDRB sektor pertambangan.

Studi yang dilakukan oleh Demmallino et al. (2018) menggambarkan kondisi kehidupan petani sebagai akibat dari implementasi kebijakan pertambangan. Respon petani di kawasan lingkaran tambang Bahodopi menanggapi kehadiran tambang dengan pandangan yang berbeda-beda. Ada yang menilai kehadiran tambang memberikan dampak positif bagi diri mereka, demikian juga sebaliknya menilai negatif. Pemaknaan petani terhadap dampak pertambangan yaitu: 1) kehadiran pertambangan memberikan pekerjaan baru bagi petani; 2) pertambangan merusak lahan atau lingkungan pertanian; 3) pertambangan memberikan nilai jual (bernilai ekonomi) tinggi pada lahan pertanian, dan 4) kehadiran perusahaan tambang merupakan sebuah berkah (sisi ekonomi) karena hidup mereka saat ini sudah membaik. Namun sebagian besar petani tidak menyadari (tidak tahu dan/atau paham) dampak jangka panjang yang ditimbulkan dari pertambangan.

Tulisan Astuti N. Kilwouw, (2014) menggambarkan perubahan pola produksi kaum perempuan di kawasan tambang PT. NHM Maluku Utara. Perempuan yang berada di daerah lingkaran konsesi menjadi korban dari politik perampasan ruang. Praktek land grabbing oleh perusahaan tambang terhadap area perkebunan tradisional warga di Kobok Pante menyebabkan para pekebun mencari dan membuka lahan baru untuk kebun. Petani bersama istri dan anggota keluarga terlibat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, berkurangnya hasil tangkapan laut di sekitar teluk Kao mengakibatkan sejumlah perempuan di Desa Tabobo kehilangan mata pencaharian sebagai pembuat terasi udang. Bahwa perempuan merupakan sosok yang paling rentan menanggung dampak terampasnya sumber-sumber penghidupan keluarga dan komunitas oleh industri tambang. Perempuan tidak hanya dirampas sumber hidupnya terkait eksploitasi tambang namun juga menjadi korban ganda dalam struktur masyarakat patriarki. Beban pekerjaan perempuan semakin banyak karena mereka harus bekerja sebagai petani, pemecah batu ataupun pembuat terasi udang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pada saat yang sama, perempuan juga harus mengerjakan hampir semua pekerjaan rumah tangga seperti membersihkan rumah, mengurus anak, mencuci, mengambil air bersih, memasak hingga melayani suami. Akibatnya adalah perempuan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk pekerjaan-pekerjaan produksi dan domestiknya, hanya sedikit waktu bagi perempuan untuk beristirahat.

Sejak PT NHM beroperasi, Sungai Kobok dan Tabobo yang menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan air bersih warga sekitar tidak dapat dimanfaatkan. Warga (termasuk perempuan pekebun) terpaksa mengkonsumsi air kemasan dan air galon. Jika persediaan air dari rumah yang dibawa ke kebun habis, maka warga terpaksa mengkonsumsi air sungai Kobok dan Tabobo yang telah tercemar dekat dengan kebun mereka. Aktivitas domestik dan produktif lain oleh perempuan di lingkaran konsesi PT. NHM yang bersentuhan langsung dengan sungai-sungai seperti mencuci, mencari kerang, mandi hingga mengkonsumsi air tersebut berdampak pada semakin rentannya mereka terhadap penyakit karena sungai terhubung dengan saluran pembuangan limbah perusahaan tambang.

Studi Gogali, (2012) yang mengkritisi investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) atau Penanaman Modal Asing (PMA) dalam laporan OECD menyebutkan bahwa memberi kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi. Kontribusi tersebut berupa produktivitas yang dihasilkannya (economic growth), memberi kontribusi bagi penyatuan ekonomi global melalui perdagangan dan investasi (trade and investment), mendorong adanya alih teknologi (technology transfer), memiliki pengaruh dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (human capital enhancement), memberi pengaruh yang signifikan akan adanya kompetisi di negara penerima dan potensial mendorong pengembangan usaha. Pada kenyataannya investasi asing juga memperoleh kecaman, kritik tajam terhadap dampak sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan yang ditimbulkan oleh korporasi tambang. Korporasi dianggap bertanggungjawab terhadap pengrusakan hutan, degradasi lingkungan di seluruh dunia. Di negara pemilik sumberdaya seperti Indonesia, sumberdaya alam dikuras habis oleh perusahaan tambang dan dibawa ke negara-negara maju meninggalkan masyarakat lokal. Ketimpangan ekonomi bagi buruh dengan upah yang sangat rendah sementara para pemegang saham, termasuk konsumen mendapatkan keuntungan dan kemajuan. Program corporate social responsibility (CSR) sebagai jalan tengah menyeimbangkan kepentingan bisnis dan masyarakat luas serta lingkungan tanpa campur tangan pemerintah terhadap pasar global. Namun dalam implementasi CSR dianggap menyimpan

masalah karena implementasinya tidak dilakukan secara baik dan jujur sehingga CSR hanya menjadi alat legitimasi praktek perusahaan multinasional mealukan penambangan yang dapat merusak keberlanjutan alam dan lingkungan sosial. Beberapa program pengembangan masyarakat yang dilaksanakan oleh PT. Inco tidak signifikan berperan dalam mendorong kemajuan ekonomi, kehidupan sosial dan lingkungan hidup di Kabupaten Morowali pada khususnya. Program pengembangan masyarakat ini tidak berkontribusi dalam kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungan, bahkan sebaliknya bahwa PT. Inco menggunakan program pengembangan masyarakat untuk mengambil keuntungan bagi kelancaran operasional perusahaannya yakni menutupi dampak ekonomi, sosial yang dialami masyarakat; mereduksi perlawanan masyarakat dan menjadi alat mengalihkan isu dampak lingkungan, sosial, ekonomi yang dialami oleh masyarakat lokal.

Menjadi lebih ironis lagi ketika Pemerintah Daerah memanfaatkan program pengembangan masyarakat sebagai jalan menuju kesejahteraan karena urusan kesejahteraan masyarakat dibebankan pada perusahaan tambang. Penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan seperti pembangunan PAUD/TK, SD dan puskesmas seharusnya menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah namun menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang jangka panjang. Persekongkolan antara perusahaan dengan negara, melalui pemerintah daerah yang menambah berat beban masyarakat; kemiskinan struktural dan dilindunginya perusahaan oleh negara baik melalui aparat keamanan maupun perundang-undangan.

Muhammad et al, (2024) dalam studinya tentang persepsi kelompok kepentingan dalam kaitannya dengan kinerja program CSR yang dijalankan oleh PT. Vale menggambarkan dimensi pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan dirasakan oleh masyarakat setempat lebih baik dibandingkan pada masa pengelolaan oleh PT. Inco. Dari persepsi kelompok kepentingan, hanya kelompok perempuan menilai sebelumnya (PT. Inco) masih dianggap lebih baik. Dimensi sosial diukur dari berbagai program bantuan sosial yang dilakukan oleh PT. Vale belum dianggap lebih baik dari PT. Inco. Dari perspektif kelompok kepentingan, yaitu aparat pemerintah, Nelayan/Petani, Pemuka Adat, dan Pegawai menilai program sosial PT. Vale lebih baik dibandingkan PT. Inco. Hanya pemimpin perempuan, tokoh masyarakat, dan pengusaha lokal yang menilai PT. Inco lebih baik. Dimensi penyerapan tenaga kerja lokal untuk bekerja di perusahaan, PT. Vale masih undervalued dibandingkan perusahaan sebelumnya. Tokoh perempuan, nelayan/petani, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pengusaha lokal menilai penyerapan tenaga kerja lokal selama di bawah naungan PT. Inco masih lebih baik dibandingkan PT. Vale. Anggapan bahwa PT. Vale mendukung penyerapan tenaga kerja, persepsi ini dari kelompok karyawan, sedangkan kelompok aparat pemerintah menilai terkait perekrutan PT. Vale dengan perusahaan sebelumnya sama saja. Dalam dimensi perbaikan kondisi ekonomi masyarakat, PT. Vale dinilai lebih baik dari perusahaan sebelumnya oleh kelompok kepentingan seperti pejabat pemerintah, nelayan/petani, karyawan Vale, dan tokoh adat. Secara berbeda, tiga kelompok kepentingan lainnya yaitu tokoh perempuan, tokoh masyarakat, dan pengusaha lokal menilai PT. Inco lebih baik dalam meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat.

2.1.3. Studi Tentang Tambang dan Dinamika Sosial Budaya.

Hubungan tambang dan kehidupan masyarakat sangat dinamis karena kehadiran perusahaan tambang mengubah struktur dan relasi manusia dalam proses

produksi dan kehidupan sosialnya. Penolakan dan perlawanan (konflik) serta kompromi (penerimaan) terhadap perusahaan tambang menjadi narasi yang panjang karena konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat tidak bersumber dari penyebab tunggal melainkan banyak hal yang dipertentangkan serta melibatkan banyak aktor dan kepentingan. Studi Zainuddin (2012) menjelaskan tentang konflik di kawasan tambang emas Poboya Palu mengeksplorasi perspektif dan kepentingan yang berbeda dari pemerintah, perusahaan, masyarakat lokal, dan LSM yang terlibat dalam konflik. Perspektif ekologi politik sebagai alat analisis untuk menguji dinamika kekuasaan dan representasi masyarakat adat dalam mengendalikan kegiatan pertambangan.

Konflik di kawasan tambang emas Poboya dikaitkan dengan ketidak-setaraan dan ketidakadilan sosial, budaya, dan ekonomi. Pemerintah memandang masyarakat adat sebagai ancaman terhadap kawasan konservasi, yang mengarah pada subordinasi dan kemiskinan bagi masyarakat. Konflik ditandai dengan tahap-tahap seperti pra-konflik, konfrontasi, krisis, konsekuensi, dan pasca-konflik. Dalam analisisnya tentang kekerasan terjadi menimbulkan lebih banyak kekerasan dengan melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah, masyarakat lokal, perusahaan, dan LSM, yang dijelaskan dalam konteks konflik. Pemerintah menetapkan Poboya sebagai kawasan konservasi (Tahura) namun di sisi lain menerbitkan izin hak pemanfaatan sumberdaya kepada korporasi (PT. CPM). Masyarakat lokal merasa kehilangan tempat dan kepemilikan mereka yang sah. Konflik terjadi dengan dukungan LSM kepada komunitas lokal untuk aktivitas pertambangan di kawasan tersebut. Peliknya masalah praktik penambangan tradisional tidak memiliki standar keselamatan dan ada kekhawatiran tentang peran dan potensi konflik kepentingan dari Lembaga Adat dengan klaim kepemilikan hak ulayat. Status kepemilikan area penambangan semakin memperkeruh situasi di Poboya.

Studi Ambo Upe, (2018) di kawasan tambang Bombana melihat dalam dua hal; Pertama, perspektif ekonomi politik ekologi (political ecology) melihat hasil tambang dan kawasan pertambangan dari kacamata pertarungan kekuatan antar aktor pemangku kepentingan dan dari perspektif sosiologi kritis yang melihat bagaimana penguasaan sumberdaya alam (*natural resources sociology*) membangun struktur-struktur sosial termasuk kelembagaan-kelembagaan baru dalam masyarakat di sisi lainnya; Kedua, bahwa perubahan sosial terjadi dalam masyarakat yang berinteraksi dalam ruang sempit kuasa-menguasai sumberdaya alam dalam hal ini adalah tambang emas di Kabupaten Bombana. Penguasaan sumberdaya alam untuk kepentingan ekonomi dari perspektif ekonomi politik ekologi selalu dimulai dengan pertanyaan bagaimana aktor menguasai sumberdaya alam, bagaimana akses dan kontrol direbut untuk kepentingan mereka.

Analisis ekonomi politik ekologi sumber daya alam juga berujung pada pertanyaan-pertanyaan kritis tentang siapa akhirnya akan menguasai apa (who controls what), siapa akhirnya mendapatkan apa (who gets what), siapa akhirnya mendapatkan berapa banyak manfaat (how much do they gain the benefit) dan siapa yang pada akhirnya menanggung risiko-risiko negatif (biaya sosial atau biaya eksternalitas negatif) atas operasi dan ekspansi penguasaan sumber daya alam (who suffers much from the operation of resources exploitation) di suatu kawasan. Kontestasi wacana Foucault sebagai perspektif teoritis untuk merebut kekuasaan dimana "iming-iming kesejahteraan" sebagai konsekuensi dengan adanya perusahaan tambang yang diwacanakan oleh penguasa lokal (gubernur; bupati), investor (perusahaan) yang berbeda dengan fakta sebenarnya bahwa masyarakat yang berada dalam kawasan tambang justru berada dalam kondisi kekurangan dan

kemiskinan serta terbelakang dalam kondisi kemiskinan dan pendidikan; disisi lain kontra wacana penolakan perusahaan tambang dan degradasi lingkungan yang diakibatkan oleh tambang juga disalurkan melalui media. Pada studi ini terlihat wacana dominan (penguasa/pemerintah) lebih cenderung kepada investor dengan meminjam tesis Bourdieu tentang kekuasaan (dominasi) menjadi milik pemerintah yang notabene adalah kelompok minoritas sedangkan masyarakat banyak sebagai kelompok mayoritas dikuasai.

Tulisan Rasch, (2012) menganalisis bagaimana masyarakat adat Guatemala mengklaim hak mereka untuk menjadi warga negara dan agen pembangunan mereka sendiri melalui perlawanan lokal terhadap proyek pertambangan skala besar. Masyarakat adat ini menghadapi ekstraksi sumberdaya secara besar-besaran oleh perusahaan tambang multinasional yang beresiko membahayakan karena terganggunya kualitas tanah dan air, berdampak buruk pada hubungan masyarakat, dan menghambat penentuan nasib masyarakat adat. Pada saat yang sama, pengakuan politik masyarakat adat memungkinkan mereka untuk menegosiasikan regulasi sumberdaya alam berdasarkan identitas etnis mereka, karena reformasi neoliberal telah menyebabkan desentralisasi dan tanggung jawab yang lebih besar untuk pembangunan di tingkat kota. Menurutnya, bahwa narasi pengembangan alternatif dan kewarga-negaraan tidak hanya dibentuk dalam karakter multi-skala dari gerakan anti pertambangan tetapi juga dibangun dalam berbagai cara perlawanan yang diframe sebagai perjuangan pribumi, sebagai perlawanan berbasis kelas, atau sebagai perlawanan terhadap kebijakan pembangunan neoliberal.

Studi tentang dampak pertambangan pada kelompok perempuan dan pemuda oleh Lahiri-Dutt & Mahey, (2010) di wilayah tambang PT. Kaltim Prima Coal (KPC) di Sangatta dan Bengalon. Dampak yang dirasakan dengan kehadiran perusahaan tambang adalah kedatangan imigran dan urbanisasi, standar biaya hidup yang lebih tinggi, perbaikan infrastruktur berupa jalan, sarana pendidikan (sekolah), tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan, akses ke tempat pelatihan/pendidikan dan kesempatan kerja lebih baik. Dalam analisisnya menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi tidak mempengaruhi kesetaraan laki-laki dan perempuan, dan juga tidak berdampak sama pada semua kelompok perempuan. Mereka yang memiliki pendidikan atau kemampuan ekonomi dan pemahaman baik, lebih memungkinkan untuk beradaptasi dengan perubahan dan mendapatkan manfaat dari perubahan. Dampak positif spesifik pada perempuan terkait dengan peningkatan peluang ekonomi adalah bekerja di sektor tambang, usaha yang menyuplai kebutuhan tambang dan karyawan, usaha layanan jasa dan sektor informal yang tumbuh di kawasan tambang. Bagi kelompok pemuda berdampak positif karena mereka bercita-cita untuk masa depan yang lebih baik.

Dampak negatif terhadap perempuan terkait dengan berkurangnya kesempatan dari mata pencaharian berbasis lahan yang mengarah pada penurunan status perempuan dalam keluarga dan masyarakat sambil meningkatkan beban kerja mereka. Dampak negatif seringkali spesifik untuk orang atau kelompok tertentu seperti peningkatan biaya hidup, kurangnya kesempatan kerja langsung di tambang untuk perempuan dan ketergantungan mereka pada laki-laki, dampak lingkungan (debu dan air), hilangnya lahan pertanian dan sumber daya dan kegagalan kompensasi untuk memastikan mata pencaharian alternatif yang berkelanjutan, dan kurangnya kekuatan pengambilan keputusan perempuan di tingkat masyarakat. Dampak positif pada sejumlah kecil perempuan dan pemuda yang mengalir ke perempuan melalui anggota keluarga laki-laki yang bekerja langsung di perusahaan

tambang termasuk kelompok usia muda yang mendapat manfaat dari orang tua mereka yang bekerja.

Holden dan Jacobson, (2007) menggambarkan bahwa salah satu dimensi pertambangan yang sangat mengganggu adalah konflik. Wilayah tambang di Filipina menjadi subjek tindakan kekerasan bersenjata seperti Maois (NPA), Front Pembebasan Islam Moro (MILF) dan kelompok muslim Abu Sayyaf. NPA aktif di seluruh Filipina dan dua kelompok lainnya aktif di pulau Mindanao. Operasi keamanan oleh militer Filipina dilakukan dengan alasan memberikan jaminan keamanan bagi proyek-proyek pembangunan termasuk sektor tambang. Protes masyarakat sipil terhadap paradigma pertambangan pemerintah Filipina yang berpotensi menggusur suku-suku pribumi karena setengah dari area tambang berada dalam wilayah yang diklaim sebagai wilayah leluhur. Ketika konflik antara perusahaan industri pertambangan dan suku-suku pribumi maka tidak berada dalam posisi yang menguntungkan terutama jika AFP memasuki daerah tersebut karena alasan keamanan. Menempatkan militer di perkampungan suku-suku pribumi yang kemudian direlokasi dengan alasan keamanan merupakan penghalusan kalimat penggusuran yang berarti kehidupan mereka terputus hubungan dengan lingkungannya dan mereka akan harus menciptakan komunitas baru dan budaya mereka akan punah.

Tulisan Jan Lust, (2014) tentang pekonomian Peru yang sangat bergantung pertumbuhannya pada ekspor sumberdaya alam, investasi pada sektor pertambangan dan hidrokarbon. Pemerintah Peru dan perusahaan pertambangan menghadapi protes anti-tambang dengan cara yang berbeda. Pemerintah mendorong kebijakan inklusi sosial untuk menghilangkan dampak negatif dari kegiatan pertambangan dan kebijakan membangun dialog untuk melibatkan aktor sosial dengan esensi kebijakan pemerintah. Perusahaan pertambangan menggunakan program tanggung jawab sosial perusahaan sebagai kedok untuk menutupi dampak buruk pertambangan terhadap lingkungan dan mata pencaharian dan habitat masyarakat adat dan petani. Terjadinya penurunan harga komoditas dan volume ekspor tambang membuat pemerintah Peru memperkuat model pembangunan ekstraktifnya mengikuti aturan modal yang harus mendukung korporasi. Ini menunjukkan bahwa musuh utama masyarakat adat dan petani serta masalah untuk mengubah perjuangan dari bersifat lokal, regional menjadi perjuangan nasional untuk kebijakan pembangunan. Perjuangan untuk perubahan kebijakan pembangunan Peru oleh masyarakat adat dan petani melawan modal pertambangan dan negara. Perjuangan masyarakat tidak hanya melawan efek kumulatif dari perampasan tanah skala besar dan privatisasi tanah, pengurangan peran negara dalam perekonomian, memusatkan kekayaan di tangan segelintir orang, dan dampak negatif dari pertambangan terhadap mata pencaharian dan habitat masyarakat adat dan petani, tapi juga merupakan perlawanan terhadap mode produksi kapitalisme.

Rezim Humala mendorong proses inklusi sosial pasca konsensus Washington tentang perlunya pembangunan yang lebih inklusif tetapi tidak dapat menghilangkan akar struktural dan ketidaksetaraan sosial dalam distribusi kekayaan dan pendapatan, kondisi yang bekerja melawan inklusi orang miskin dalam program sosial pemerintah. Karena kepentingan ekonomi antara agen-agen modal global dan negara serta hubungan ketergantungan pada dominasi modal dan ketergantungan pada pemerintah.

Tulisan Spalding (2014) menggambarkan perlawanan dan gerakan anti-tambang di El Salvador. Berawal dari persetujuan pemerintah terhadap regulasi

pertambangan dan investasi serta naiknya harga emas menyebabkan banyak perusahaan melakukan investasi. Seiring dengan kegiatan eksplorasi dan izin pertambangan berlangsung, muncul kelompok oposisi anti tambang yaitu MESA. Menekankan pada isu-isu seperti demokrasi langsung dan pengambilan keputusan otonom dan menolak kontrol hierarkis; prioritas pada kelangsungan hidup dan hak atas rezeki sebagai implikasi dari konsep hak asasi manusia; mencermati penggunaan dan penyalahgunaan wilayah dan ruang fisik sebagai perspektif aktivisme lokal dan mobilisasi kekuatan melawan kerusakan lingkungan. Perjuangan MESA berhasil saat kepemimpinan ARENA menghentikan proses izin ekstraksi tambang.

Ketika moratorium pertambangan mulai berlaku, aktivis anti-pertambangan bergabung mendukung transisi kepemimpinan politik baru. Front Pembebasan Nasional Farabundo Marti (FMLN) didirikan oleh kaum revolusioner berkonsolidasi sebagai partai politik. Pada masa Funes (2009-2014), ruang untuk debat publik tentang dampak tambang diperluas dengan membatasi penambangan logam. Pada masa itu mulai meningkatnya jumlah pembunuhan dan ancaman terhadap aktivis anti-pertambangan. Di komunitas Cabanas dekat proyek penambangan emas Pacific Rim (transnasional Kanada) yang diusulkan, afiliasi MESA Marcelo Rivera, Ramiro Rivera, dan Dora Alicia Recinos Sorto dibunuh antara Juni dan Desember 2009. Anggota kelompok anti-tambang lokal rawan mengalami penculikan, penyerangan, vandalisme, dan ancaman pembunuhan walaupun ada perlindungan dari pihak berwenang setempat namun sangat lemah.

Meningkatnya kekerasan membuat Presiden El Salvador mengambil langkah prosedural memeriksa industri pertambangan dan melakukan investigasi. Tekanan internal dan eksternal membatasi dampak dari transisi ini. Secara internal pemerintah menghadapi polarisasi dan resistensi dari ARENA. Secara eksternal, kekhawatiran terganggunya hubungan dengan Amerika Serikat dan resiko kemungkinan pemutusan bantuan dan investasi. Dilema antara komitmen kampanye anti-pertambangan dan membentuk tekanan pro-pertambangan yang tidak dapat diterima. Perusahaan tambang asing mengajukan klaim terhadap pemerintah El Salvador pada mahkamah internasional untuk penyelesaian sengketa investasi. Perusahaan-perusahaan ini telah diberdayakan oleh kebijakan yang diadopsi selama periode kemajuan neoliberal, yang mencakup ketentuan "investor-negara" yang memungkinkan investor asing untuk membawa perselisihan dengan negara tuan rumah ke pengadilan internasional. Perusahaan-perusahaan ini mengklaim bahwa moratorium ini melanggar ketentuan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Tengah yang diterapkan di Amerika Serikat (CAFTA) dan undang-undang investasi El Salvador sendiri tahun 1999. Mereka menuntut agar pemerintah El Salvador melalui pengadilan ICSID memberi mereka akses ke pertambangan dan untuk mengkompensasi mereka atas pendapatan yang hilang karena moratorium. Perjuangan anti-pertambangan di El Salvador mengadaptasi struktur aliansi internasionalnya untuk memasukkan jaringan sekutu yang luas. Gerakan ini melampaui batas komunitas yang terkena dampak dan memasukkan kelompok dan aktor baru berjuang untuk mempertahankan prinsip dan strategi yang terkait dengan gerakan horizontalisme semakin intensif.

Dinamika pertambangan di Amerika latin juga digambarkan oleh Bebbington et al., (2008) membahas tentang gerakan sosial sebagai bentuk perlawanan investasi pertambangan di Amerika Latin. Berdasarkan kasus-kasus dari Peru dan Ekuador dijelaskan bahwa kehadiran dan sifat gerakan sosial berpengaruh pada bentuk industri ekstraktif dalam hal ini pertambangan dan pada pengaruh industri

ekstraksi pada mata pencaharian masyarakat pedesaan. Gerakan sosial pedesaan menghadapi investasi modal skala besar yang berdampak pada mata pencaharian pedesaan dan perubahan teritorial. Pendekatan Rural Territory Development (RTD) yang menekankan bahwa pembangunan pedesaan membutuhkan modernisasi produksi dan kelembagaan, serta upaya sadar untuk mengartikulasikan proses modernisasi dengan konsepsi ruang antara ekonomi perkotaan dan pedesaan, kegiatan di dalam dan di luar pertanian, ide-ide wilayah yang dibangun secara sosial dan konsepsi teritorial administratif pemerintahan. Gerakan sosial dipahami berhubungan dua jenis akumulasi yang berbeda akumulasi dengan eksploitasi dan akumulasi dengan perampasan. Bentuk akumulasi berpusat pada tempat kerja menghasilkan gerakan buruh, serikat pekerja, dan organisasi politik terkait. Sebaliknya, perlawanan terhadap akumulasi dengan perampasan seperti halnya privatisasi tanah dan air cenderung mengambil bentuk gerakan sosial baru, seputar isu-isu seperti tanah dan hak-hak minoritas. Gerakan sosial muncul ketika kehidupan manusia, domain praktik sehari-hari mereka bermakna dijajah oleh kekuatan yang mengancam dan kemampuan orang untuk mengendalikannya. Gerakan sosial muncul untuk membela dan memulihkan kehidupan dan organisasi sosial yang terancam.

Gerakan menentang industri ekstraktif sebagai alat untuk melawan kolonisasi kehidupan dunia dan ancaman terhadap mata pencaharian. Gerakan perlawanan di sekitar pertambangan oleh serikat pekerja tambang di Bolivia dengan kekuatan mobilisasi yang sebagian besar revolusi Bolivia 1952. Mobilisasi pekerja melakukan protes pada tahun 2006 terkait kompensasi dan tunjangan pekerja di tambang La Escondida milik BHP Billiton di Chili karena teknologi semakin menggantikan tenaga kerja, karyawan formal menjadi lebih terampil, dan karyawan berketrampilan rendah direkrut dengan kontrak jangka pendek, sehingga konflik antara serikat pekerja dan tambang terus menjadi lebih kecil kemungkinannya dan lebih terlokalisasi dibanding sebelumnya. Pada saat yang sama, perubahan teknologi telah mengubah banyak deposit mineral sebelumnya tidak menarik mulai dieksploitasi karena bernilai komersial. Hal ini merupakan ancaman baru terhadap basis material dan budaya mata pencaharian memunculkan jenis gerakan baru yang menentang masalah perampasan dan kolonisasi. Perampasan tanah oleh penambangan baru pada areal tempat mineral tersimpan. Gerakan protes karena hilangnya wilayah dan memaksa penjualan tanah dengan harga rendah. Perihal perampasan sumberdaya di mana gerakan memprotes hilangnya wilayah oleh modal swasta asing. Perampasan adalah masalah kerugian baik dalam jumlah aset orang (tanah, aliran air, penggembalaan, mineral) dan kualitas aset ini (polusi air dan udara). Perampasan juga dapat dipahami sebagai hilangnya cara hidup, dan seperangkat asumsi tertentu yang diterima begitu saja tentang mata pencaharian dan pembangunan.

Studi yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Perdamaian dan Pengelolaan Konflik (P4K) Universitas Tadulako (2019) menggambarkan situasi masyarakat Bahodopi yang telah melewati satu dekade masa pertambangan nikel dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Temuan pada studi menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap tambang di Kec. Bahodopi memiliki persepsi positif dengan keberadaan kawasan industri PT. IMIP yang digambarkan dari 67% responden menjawab baik. Alasan persepsi positif tersebut terdiri dari; peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan bekerja, kesempatan berusaha, adanya bantuan pendidikan, kesehatan dan peluang menjadi supplier. 33% berpendapat negatif, didasarkan pada alasan susahnyanya untuk bekerja di perusahaan, perubahan pola pencaharian, kerusakan lingkungan, susahnyanya akses

menjadi pengusaha lokal, terjadinya konflik sosial akibat banyaknya pendatang (P4K-UNTAD, 2019).

Studi yang dilakukan Lingkaran Pembaruan Desa dan Agraria (KARSA) bekerjasama Laboratorium Antropologi FISIP UNHAS (2021) melakukan Kajian Sosial Ekonomi untuk Pengembangan Kerjasama Masyarakat di Wilayah Kontrak Karya PT. Vale Indonesia. Studi ini dilakukan ini bertujuan mencari solusi permasalahan terhadap aktivitas pemanfaatan lahan oleh masyarakat di area kontrak karya untuk meminimalisir resiko seperti konflik, resiko biaya untuk penyelesaiannya. Pendekatan untuk penyelesaian masalah penggunaan lahan oleh pihak non-perusahaan dengan: pendekatan berbasis multipihak, sebagai upaya alternatif dari penyelesaian masalah yang sebelumnya lebih mengutamakan pendekatan law enforcement; pendekatan berbasis sistem informasi penggunaan lahan, sehingga penyelesaian penggunaan lahan oleh pihak non-perusahaan tercatat secara spasial dan lebih mudah dikontrol; pendekatan berbasis data yang terhimpun dalam sistem informasi penggunaan lahan yang memuat hasil sensus sosial, ekonomi, dan budaya; dan hasil pemetaan geo-sosio-spasial secara partisipatif.

Temuan studi ini bahwa terjadi penggunaan lahan oleh pihak non-perusahaan terjadi secara masif, intensif, dan historis di beberapa wilayah kontrak karya PT. Vale. Masif berarti penggunaan lahan oleh pihak non-perusahaan terjadi dalam sebaran wilayah yang sangat luas, dan jumlah yang relatif banyak. Pada daerah tertentu seperti di Blok Pomalaa penguasaan lahan oleh pihak non-perusahaan diperkirakan mencapai 30% dari luas wilayah keseluruhan. Intensifnya penggunaan lahan itu berlangsung secara terus-menerus karena hanya sedikit lahan kebun yang terbengkalai dan menjadi bagian penting dalam ekonomi rumah tangga pelaku. Secara historis penggunaan lahan oleh pihak non-perusahaan ini telah berlangsung sejak lama, bahkan terjadi sejak awal kegiatan pertambangan di daerah itu, yaitu pada paruh kedua dasawarsa tahun 1960an (Zakaria, 2021).

Pada studi Syafruddin et al., (2019) menjelaskan tentang dinamika keberdayaan masyarakat sekitar pertambangan yang termasuk kategori rendah di Kabupaten Bombana. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei, analisis data secara deskriptif dan inferensial. Dijelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya dinamika keberdayaan masyarakat disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya motivasi, jumlah tanggungan keluarga, buruknya persepsi terhadap pertambangan dan terhadap pemberdayaan oleh perusahaan, dan rendahnya tingkat partisipasi, rendahnya dukungan faktor eksternal, tingginya konflik sosial, dan rendahnya kompetensi adaptif masyarakat. Strategi pemberdayaan masyarakat di sekitar pertambangan adalah: Optimalisasi peran masyarakat sekitar pertambangan dalam pelaksanaan program pemberdayaan dengan cara penguatan peran serta tenaga pendamping dalam program pemberdayaan, pengelolaan konflik; upaya peningkatan kompetensi adaptif masyarakat.

2.1.4. Studi Tentang Tambang dan Nilai Budaya.

Dampak pertambangan terhadap sistem nilai budaya terutama kaitannya dengan lahan atau tanah dalam sistem produksi petani, hunian yang menjadi habitus dari orang-orang yang bermukim di kawasan tambang. Salah satu permasalahan yang melingkupi masyarakat di kawasan tambang adalah permasalahan lahan atau tanah yang merupakan hak milik atau dikuasai oleh masyarakat yang akah diambil alih oleh perusahaan tambang. Terkait hak atas tanah atau lahan oleh perusahaan

dan pemerintah melakukan praktek eksklusi seperti pelarangan dan membatasi akses (Hall et al, 2013) masyarakat terhadap sumberdaya lahan maupun proses-proses yang dilakukan untuk mengambil alih kuasa (land grabbing) atas lahan (Peluso & Lund, 2011; Aditjondro, 2002) yang potensial seperti kawasan tambang Bahodopi. Aktor-aktor menggunakan kuasa untuk mengendalikan siapa yang dapat dan tidak dapat mengakses tanah, serta manfaat yang dihasilkan dari penggunaannya. Lebih lanjut oleh (Borras Jr. et al., 2011) menyebutkan bahwa tersingkirnya masyarakat atas ruang bisa disebabkan oleh berbagai proses. Ada empat proses yang menyebabkan orang bisa tersingkir dari tanahnya, pertama melalui regulasi, pasar, paksaan dan legitimasi.

Perspektif berbeda dari Muhammad (2017) menjelaskan perlawanan masyarakat lokal pemilik sumberdaya terhadap perusahaan sebagai bentuk gerakan sosial baru (new social movement) yaitu dengan menggunakan identitas kolektif (indigenous community) sebagai pemukim asli yang menempati wilayah konsesi PT. Inco dengan klaim-klaim kultural yang dimiliki seperti tempat aktivitas ekonomi tradisional seperti tempat berburu, tempat bercocok tanam dan berkebun, tempat penggembalaan dan daerah asal usul leluhur sebagai bentuk ikatan dengan lingkungan alam di wilayah konsesi tambang. Situasi tersebut menyebabkan terjadinya akumulasi kemiskinan pada masyarakat lokal dengan mengambil alih kepemilikan sumberdaya serta menutup akses dengan cara privatisasi.

Dalam tulisan Amiruddin dan Soares (2003) menggambarkan kehadiran PT. Freeport dalam kehidupan dan aktivitas suku Amungme yang menyebabkan masalah baru bagi mereka. Permasalahan seperti hilangnya hak ulayat atas tanah, rusaknya sistem sosial-ekonomi, rusaknya lingkungan hidup dan sumberdaya alam akibat perubahan ekosistem, termasuk terjadinya berbagai tindak kekerasan (pelanggaran HAM), ancaman bahan kimia berbahaya, intimidasi dan stigmatisasi sebagai bagian dari GPK/OPM. Perlawanan suku Amungme melalui Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (LEMASA) mengugat induk perusahaan PT. Freeport Indonesia yaitu Freeport McMoRan Copper and Gold, Inc. (FMCG) di New Orleans Louisiana, Amerika Serikat. Tujuannya adalah agar PT. Freeport menghargai keberadaan suku Amungme dan hak-hak di atas tanah mereka rampas. Sikap aparat birokrasi pemerintah menganggap warga di sekitar lokasi tambang Freeport sebagai suku-suku primitif, bodoh, malas, serta tak tahu berterima kasih dan tidak mempertimbangkan keberadaan suku-suku dengan mengklaim bahwa lahan tanah yang dikuasai oleh Freeport adalah tanah negara.

Bagi orang Amungme, tanah tidak hanya bernilai ekonomi, melainkan juga bermakna magis-religius. Konsep pengklasifikasian tanah dibagi berdasarkan fungsi dan penggunaan tanah harus sesuai dengan ketentuan adat. Bagi suku Amungme, tanah ibarat seorang ibu yang memberikan kehidupan kepada anaknya sehingga fungsi tanah terintegrasi ke dalam aktivitas kehidupan. Tanah adat dalam konsep orang Papua adalah hak milik sekaligus hak atas penguasaannya. Tanah merupakan modal utama kehidupan yang terkait berbagai nilai, diantaranya nilai ekonomi, politik, pertahanan, dan religius-magis dan kepemilikan tanah bagi suku Amungme bersifat komunal. Sifat komunalisme mensyaratkan bahwa perpindahan kepemilikan atas tanah menjadi urusan komunal atau urusan semua anggota suku, bukan urusan individu.

Suku Amungme menganggap puncak-puncak gunung tertinggi, seperti Puncak Carstenz, Ertzberg, Grassberg beserta lembah-lembah di sekitarnya sebagai daerah suci dan keramat yang tidak boleh diganggu. Wilayah itu diibaratkan sebagai kepala dari ibu mereka merupakan tempat bersemayam leluhur suku Amungme.

Dalam mitologinya, kawasan itu juga dipahami sebagai tempat asal muasal suku Amungme ketika meninggal mereka akan kembali ke daerah asal atau ke pangkuan ibu. Suku Amungme mempercayai bahwa setiap anggota suku yang meninggal dunia harus dikubur di daerah pegunungan yang dianggap sebagai tempat yang bernilai religius-magis, dimana telah menjadi tempat kegiatan tambang emas dan tembaga oleh Freeport.

Daerah bagian bawah dari pegunungan salju disebut Menamorin diibaratkan sebagai leher sampai pusar dari tubuh seorang ibu. Tempat manusia lahir dan dibesarkan dari air susu ibu sebagai lambang pemberi kehidupan. Mata air diyakini sebagai air mata dari ibu yang rasa sayang kepada anak-anaknya dipergunakan untuk kehidupan. Di daerah ini tumbuh berbagai macam tumbuhan dan hidup berjenis binatang liar dan menjadikan lahan bercocok tanam serta menjadi tempat hunian suku Amungme dengan aktivitas kehidupannya. Kawasan kaki bukit dan hamparan dataran rendah disebut Onisa diibaratkan sebagai kaki dan kemaluan ibu dijadikan tempat dan pada batas-batas tertentu diperlakukan sebagai kawasan terlarang karena dapat mendatangkan mara bahaya dan penyakit. Suku Amungme menganggap sungai yang mengalir ibarat air seni yang mengalir dari daerah kaki. Kawasan pantai bukan daerah hunian dan dianggap angker dan dapat mendatangkan bala yang menimbulkan penyakit. Daerah pegunungan yang dianggap keramat penguasaan dan kepemilikannya diatur sesuai dengan marga yang memiliki wilayah itu, sedangkan untuk eksternal diatur secara adat oleh warga Amungme.

Keterkaitan manusia dan tanah dalam konteks pertambangan juga dijelaskan oleh Novenanto, (2015) yang menjelaskan tentang kehilangan tanah yang dialami oleh masyarakat Sidoarjo karena luapan lumpur Lapindo. Luapan lumpur Lapindo telah mengakibatkan pengosongan wilayah sejumlah 15 (lima belas) desa/kelurahan di tiga kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yang dihuni lebih dari 150.000 penduduk. Secara spesifik tulisan ini membahas bagaimana kompensasi yang diterapkan untuk mengganti kehilangan yang dialami manusia yang memunculkan permasalahan baru. Relasi manusia dengan tanahnya sangat unik karena pada tanah manusia tidak hanya melekatkan nilai ekonomi tapi juga nilai sosial dan budaya. Mengutip penjelasan Stuart Kirsch (2001) tentang "(perasaan) kehilangan," seperti halnya "(perasaan) memiliki," adalah manifestasi dari relasi sosial bahwa "perasaan kehilangan" cenderung menguat akibat pemutusan paksa manusia dari tanah huniannya. Relasi manusia dengan tanah dalam kasus ini terdapat dua jenis relasi sosial yaitu relasi antar-aktor manusia dan antara manusia dengan tanah. Kedua relasi tersebut semakin kompleks seiring dengan hilangnya tanah secara paksa.

Relasi antar-manusia sebagai transaksi dan relasi manusia dan objek (tanah) sebagai kepemilikan. Pada relasi transaksi, tanah dianggap sebagai objek yang pasif, yang dipolitisasi oleh manusia sehingga persoalan hilangnya kepemilikan atas suatu objek dan kompensasi atas kehilangan itu bisa diurai dengan baik. Kehilangan tanah dan lahan serta kompensasi dengan mempertimbangkan pendekatan objek yang melihat bagaimana aktor terikat atau mengikatkan diri pada suatu objek (tanah/lahan). Kekhawatiran manusia bukan hanya pada soal hilangnya tanah, melainkan lebih pada kekhawatiran akan hilangnya nilai-nilai yang sudah dilekatkan pada tanah tersebut. Cernea, (2003) menyebutkan bahwa beragam jenis kehilangan yang dialami korban pemindahan paksa, tentang kehilangan terkait dengan relasi manusia dan tanah. Tiga hal berpotensi ikut hilang seiring hilangnya tanah yakni hilangnya kehidupan sosial keseharian terkait dengan tanah, bahwak ehidupan sosial keseharian yang pernah terjadi di atas tanah itu menjadi hilang; hilangnya

objek membuka kemungkinan bagi hilangnya pengetahuan tentang objek. Kehilangan tanah tempat kehidupan sosial keseharian terjadi bukan sekadar pengetahuan tentang tanah yang hilang melainkan juga kehidupan sosial keseharian yang pernah terjadi terkait tanah itu. Subjek membangun pengetahuan intersubjektif tentang tanah dan kehidupan sosial keseharian yang hilang. Pengetahuan yang tersimpan dalam setiap subjek yang mengalaminya dan hanya dikeluarkan pada momentum tertentu. Namun tidak semua orang punya peluang yang sama dalam mereproduksi dan mengartikulasikan pengetahuannya kepada orang lain, walaupun ada peluang belum tentu juga orang lain itu akan menerimanya begitu saja; ketiga, bahwa tanah adalah “hunian” bukan sekadar tempat yang didiami atau tinggal tapi juga tempat yang dipelihara dan rawat seperti halnya kita memelihara dan merawat diri sendiri. Pada level ini tidak sedang berbicara tentang “kepemilikan,” tapi lebih tentang “perasaan memiliki” tanah. Kondisi ini membawa kita pada kehilangan ketiga yaitu hilangnya identitas kolektif dan intersubjektif yang terbentuk dari kehidupan sosial/keseharian bersama tanah itu. Tanah adalah objek yang turut membentuk identitas para aktor yang terikat dan mengikatkan diri padanya. Hilangnya tanah berarti juga hilangnya nilai-nilai lama yang dilekatkan pada tanah itu tergantikan oleh nilai-nilai baru (Novenanto, 2015).

Tulisan Maribeth Erb, (2016) menjelaskan tentang penerimaan usaha tambang di Nusa Tenggara Timur. Tulisan Erb menekankan konflik atas berbagai nilai, seperti keadilan, demokrasi, keberlanjutan, pelestarian lingkungan dan tradisi budaya yang dianalisis melalui kasus terkait sejarah tambang di NTT. Membangun kritik secara kontras antara pembangunan yang tidak berkelanjutan versus berkelanjutan. Wilayah NTT sebagai nexus pertambangan dan pariwisata, meskipun pertambangan pariwisata tidak berhubungan. Dalam ruang imajiner, kedua industri ini sering disandingkan oleh mereka yang menolak penambangan. Bahwa NTT dalam imajinasi yang dibangun oleh aktor-aktor tertentu sebagai wilayah miskin, rapuh, tradisional, potensi tidak mencukupi, kemampuan sumber daya manusia rendah dan terbelakang. Aktor berbeda yang membangun gagasan NTT memiliki posisi yang berbeda dalam hal pertambangan atau pariwisata keduanya dianggap sebagai industri yang sangat menjanjikan untuk pembangunan di daerah miskin di Indonesia ini.

Artikulasi nilai-nilai ini sering dilakukan secara biner, ada yang melihat tambang sebagai ancaman terhadap nilai-nilai yang dianggap penting seperti tradisi, budaya dan komunitas. Tambang juga dikhawatirkan merusak lingkungan terutama air dan tanah yang secara intrinsik sebagai dasar dari identitas masyarakat petani. Pada sisi lainnya, ada yang mengartikulasikan nilai-nilai kemajuan dan modernitas. Mereka melihat pertambangan sebagai cara yang penting dan efisien untuk menghasilkan uang sehingga memungkinkan orang tua untuk mendidik anak-anak mereka, membangun rumah yang lebih baik dan menjalani gaya hidup dengan materi yang lebih nyaman.

Industri pariwisata kadang juga seperti industri ekstraktif namun dianggap lebih kompatibel dengan nilai-nilai keberlanjutan, konservasi lingkungan, budaya dan tradisi. Sedangkan pertambangan menjadi katalisator bagi masyarakat NTT untuk lebih hati-hati memikirkan kembali pembangunan dan hubungannya dengan pertanyaan tentang keadilan, demokrasi, konservasi lingkungan dan tradisi budaya. Gagasan pertambangan hijau merangkum gagasan keberlanjutan dalam hal penggunaan lingkungan, serta alokasi sumberdaya secara adil. Kenyataannya terkait dengan industri pertambangan dalam periode kurang dari 10 tahun telah memberikan izin sejumlah 315 izin pertambangan. Gagasan tentang pertambangan

hijau kemudian mengarah pada demokrasi sebagai nilai. Izin pertambangan di era reformasi di NTT mendapat protes setelah diterbitkan secara kontroversi dan dianggap tidak demokratis karena izin diberikan dan rencana yang dibuat berhubungan dengan kehidupan penduduk desa yang miskin tanpa persetujuan mereka. Protes yang terjadi kemudian didasarkan pada nilai inti lainnya yakni nilai tradisi dan ini menjadi contoh model perlawanan yang berhasil terhadap penambangan di NTT.

Studi tentang relasi kuasa dalam kegiatan pertambangan di NTT oleh Kuswardono, (2014) menggambarkan proses perubahan kawasan sosial-ekologi menyenarah pada masyarakat pedesaan di Timor Barat. Pembentukan relasi kuasa di babak ekstraksi dijelaskan dengan modifikasi relasi kuasa pada penguasaan lahan dan pengambilan keputusan atas lahan maupun transformasi nilai yang diakibatkan oleh industri ekstraktif. Sistem pengelolaan lansekap orang Timor dari sisi struktur penguasaan lahan tradisional, relasi-relasi kerabat, produksi dan kuasa yang masih berlaku hingga saat ini. Dahulu kala orang Timor tidak merasa penting untuk memiliki lahan pribadi, namun secara faktual lahan-lahan perladangan tetap (po'an), dan semak belukar bekas ladang (bane) dapat diwariskan oleh penggunannya. Melalui mekanisme tebas bakar dan rotasi ladang selama satu kurun waktu tertentu dan kemudian ditinggalkan ketika tanah tidak lagi subur. Selama diberakan, tidak ada orang lain yang menggunakan lahan tersebut dan peladang akan kembali ke lahan yang telah diberakan. Ketika sudah berkali-kali digunakan oleh peladang yang sama, maka lahan tersebut dapat diwariskan kepada keturunannya.

Orang lain di luar wilayah penguasaan seorang amaf pada dasarnya dapat bekerja atau memiliki lahan pertanian pada satu autuf yang dikuasai seorang amaf. Orang yang berkerabat dengan klan penguasa lahan lebih mudah mendapatkan lahan melalui suatu upacara permohonan lahan karena pada dasarnya orang Timor secara moral tidak bisa membiarkan orang lain kelaparan. Seorang amaf memberikan lahan kepada anggota keluarga yang tidak memiliki lahan agar tidak kelaparan. Bagi orang lain atau orang luar yang tidak memiliki kerabat dengan klan penguasa lahan pada satu autuf atau suf tertentu masih bisa mendapatkan lahan dengan cara lain seperti perkawinan dimana seorang menantu laki-laki bisa mendapatkan lahan yang diperoleh oleh mertuanya. Lahan ini bisa diwariskan karena anak dari sang menantu kemudian menjadi kerabat. Cara lain adalah dengan bekerja tanpa upah pada satu penguasa wilayah. Lewat proses tertentu, seseorang dapat diijinkan menggarap lahan tanpa upah pada seorang amaf dan membagi hasil panennya kepada sang amaf. Jika dianggap orang tersebut baik, maka lahan garapan tersebut dapat digunakan seterusnya dan oleh keturunan sang penggarap. Para penggarap atau yang disebut juga sebagai amnemat memiliki posisi lebih rendah dalam pengambilan keputusan, terlebih ketika berhadapan dengan klan penguasa.

Cara perolehan tanah lewat cara tradisional ini memungkinkan hubungan antara pemberi lahan dengan penerima lahan memiliki tali kuasa yang tidak terputus. Berbeda dengan jual beli, penerima lahan tidak bisa sesukanya mengalihkan lahan kepada orang lain tanpa meminta persetujuan dari amaf atau keturunan amaf dimana penerima lahan atau leluhurnya pernah secara tradisional mendapatkan lahan dari klan amaf. Salah satu contoh faktual yang dapat ditemukan adalah kasus di desa Naip. Autuf di desa Naip berada dibawah penguasaan klan Taseseb dan Tefu. Leluhur klan Taseseb dan Tefu berkerabat dan mendapatkan penguasaan lahan lewat proses kawin mawin dengan klan Nubatonis yang bersebelahan desa. Saat perusahaan PT. Hamparan Alam Nusantara (PT HAN) datang membawa IUP dan

membujuk klan Taseseb dan Tefu untuk memperbolehkan penambangan mangan di Desa Naip, Harun Taseseb dan Agus Tefu harus berunding dengan klan Nubatonis yang memiliki hubungan pertalian darah dan juga sejarah penguasaan lahan. Klan Taseseb dan Tefu tidak bisa secara unilateral mengiyakan atau menolak begitu saja. Mereka harus meminta pertimbangan klan Nubatonis yang memiliki hubungan historis dengan lahan yang dikuasai oleh Klan Taseseb dan Tefu.

Perlawanan rakyat terhadap tambang di Guatemala digambarkan oleh Rebecca Pol dan Eva Bernet Kempers, (2016) dengan menggunakan kontestasi wacana. Tambang Marlin adalah proyek pertambangan besar pertama di Guatemala, yang mulai berproduksi pada tahun 2005 dan dimiliki oleh perusahaan Kanada, Goldcorp Inc., yang dijalankan oleh Montana Exploradora Guatemala. Sejak awal, tambang ini menjadi sumber konflik karena penolakan dari penduduk asli kota San Miguel Ixtahuacán dan Sipakapa. Perlawanan dilakukan setelah terjadi dampak pada desa-desa terdekat dan mendapatkan dukungan dari LSM nasional maupun internasional. Pemerintah Guatemala menekan manifestasi tersebut dan lebih melihat pada peluang pembangunan dari proyek pertambangan itu. Narasi itu yang digunakan oleh negara untuk mendukung aktivitas tambang, sedangkan perusahaan transnasional menggunakan wacana pertumbuhan kehidupan dan perekonomian yang lebih baik dengan terbukanya peluang bagi tenaga lokal untuk bekerja, termasuk wacana pertumbuhan melalui mekanisme bantuan CSR.

Lembaga Swadaya Masyarakat/NGOs yang mengadvokasi masyarakat dengan wacana sama digunakan pada tingkat internasional dan lokal seiring dengan meningkatkan kesadaran dan memperoleh pendanaan dari donor menggunakan isu-isu seperti hak asasi manusia. Di sisi lain berusaha berusaha mempertahankan legitimasi di mata penduduk setempat dengan menggunakan isu pengetahuan lokal atau adat. Narasi wacana LSM sangat dipengaruhi oleh dunia internasional dan PBB yang kemudian mempengaruhi wacana yang ada di tingkat lokal. Dalam proses ini, LSM mungkin menggantikan wacana lokal dengan konsep-konsep internasional mereka sendiri tentang adat. Di lain pihak, penduduk asli menggunakan pengetahuan adat/budaya mereka dalam narasi wacana mereka melawan pertambangan.

Dalam studi Dougherty (2011) tentang pertambangan di Guatemala yang berfokus pada pertambangan emas sekitar lokasi tambang di negara berkembang dengan mengeksplorasi hubungan antara struktur industri pertambangan emas (khususnya perusahaan skala kecil) dan perlawanan masyarakat lokal. Persaingan antara perusahaan kecil mengarahkan perusahaan-perusahaan ini untuk berinvestasi di negara-negara baik secara politis maupun geologis yang sehingga dapat berproduksi dengan biaya rendah. Secara empiris dari kasus Guatemala, di mana, sejak akhir 1990-an, eksplorasi logam oleh perusahaan skala kecil telah tumbuh sebesar 1.000 persen. Kebijakan Guatemala yang agak lunak terhadap pertambangan dan kondisi geologi menjadikannya pusat dunia produksi emas berbiaya rendah, termasuk memfasilitasi gerakan sosial anti-pertambangan dengan massa dalam skala kecil.

Fenomena bangkitnya perusahaan tambang skala kecil ini dimungkinkan karena; pertama, inovasi teknologi dalam ekstraksi emas, seperti sianidasi, karbon dalam pulp dan bentuk-bentuk baru electrowinning, menyebabkan produksi deposit emas yang tersebar secara komersial. Hal ini meningkatkan jumlah besar perusahaan dan mengurangi biaya masuk untuk perusahaan kecil dan modal minim; kedua pemerintah Kanada, menyadari peran penting yang dimainkan perusahaan skala kecil dalam eksplorasi berisiko tinggi, dan sejauh mana kontrol Kanada atas

rantai nilai mineral bergantung pada sektor perusahaan kecil, mendorong pembiayaan perusahaan-perusahaan ini melalui kebijakan 'flow through'. Perusahaan kecil berkinerja buruk dalam hal lingkungan dan sosial dibandingkan dengan produsen skala besar. Perusahaan skala kecil gagal menerapkan perlindungan lingkungan standar di lokasi produksi mereka, kurang 'termotivasi' daripada perusahaan besar secara substantif melibatkan masyarakat lokal, merencanakan pengelolaan lingkungan secara memadai dan menerapkan praktik pembangunan berkelanjutan.

Studi tentang tambang rakyat skala kecil oleh Hilson, (2003) menjelaskan pada beberapa kasus di negara Afrika, Asia dan Amerika Latin. Aktiifitas pertambangan rakyat dan skala kecil bukan sekadar industri yang memiliki potensi untuk memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan devisa dan lapangan kerja melainkan sebagai pemenuhan kebutuhan gaya hidup. Para pekerja tertarik untuk bekerja dengan harapan mendapatkan kekayaan dengan cepat, termasuk penduduk komunitas pedesaan, orang-orang nomaden, petani subsisten, dan pekerja pertambangan skala besar yang di-PHK. Hasil yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan sektor industri pedesaan, namun berbanding dengan penurunan kualitas hidup seperti gejala malnutrisi dan kelelahan karena terkena kondisi yang keras dan pekerjaan yang membosankan; daerah pertambangan yang prospektif umumnya kurang memiliki fasilitas sanitasi yang memadai, sehingga menyebabkan berbagai penyakit; dan sebagian besar operasi industri pada banyak lokasi, mengancam mata pencaharian baik pekerja maupun penduduk desa sekitar.

Studi ini dilakukan untuk memahami karakteristik antropologis utama industri ini dan dampak sosial-ekonominya masih sangat terbatas. Pemerintah di Dunia Ketiga melanjutkan regulasi terhadap operasi pertambangan rakyat dan skala kecil yang ada, walaupun tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang mekanik dan karakteristik sosial-budaya yang dimilikinya. Pemerintah kekurangan informasi yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan dan peraturan pertambangan rakyat dan skala kecil yang efektif namun sebagian besar tetap melanjutkannya dengan implementasinya. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar pemerintah tidak memiliki data yang memadai tentang lokasi sejumlah operasi pertambangan rakyat yang relevan; apa yang diekstraksi oleh masing-masing dan dalam jumlah berapa; sifat teknologi yang digunakan di lokasi; dan kelompok orang yang terlibat. Oleh karena itu perlu mengkaji dampak sosial-ekonomi dari pertambangan rakyat dan skala kecil, dan dalam prosesnya, mengatasi masalah-masalah penting yang harus dipertimbangkan selama kegiatan pembuatan kebijakan industri yang penting.

2.1.5. Studi Tentang Tambang dan Kebijakan Pertambangan.

Salah satu perspektif studi yang banyak mengkaji tentang pertambangan adalah dari perspektif ekonomi politik. Industri tambang (ekstraktif) tidak lepas dari peran negara dalam kebijakannya sebagai pintu masuk untuk memberikan izin pada perusahaan pertambangan baik perusahaan nasional maupun perusahaan transnasional. Studi yang dilakukan oleh Sangaji, (2002) mencermati industri pertambangan nikel di Indonesia sebagai bentuk "kapitalisme ekstraktif" dimana perusahaan transnasional melakukan eksploitasi sumberdaya alam seperti nikel untuk memenuhi kebutuhan pasar nikel di luar negeri. Teori Marxian menjadi perspektif analisisnya melihat ketimpangan yang dilakukan oleh perusahaan transnasional terhadap negara penghasil mineral sumber daya alam seperti Indonesia karena hasil tambang lebih banyak dinikmati oleh perusahaan penanaman modal asing dan negara asal pemodal. Dalam praktik penguasaan lahan tambang

dianggap merampas hak-hak masyarakat lokal (masyarakat asli) yang memiliki keterkaitan budaya seperti di wilayah Sorowako, serta hak-hak pemukim lainnya seperti warga transmigran di beberapa tempat seperti di Bahodopi yang dikorbankan karena tumpang tindih kebijakan antara penempatan transmigran dalam kawasan kontrak karya. Pada tulisan lainnya Sangaji, (2009) menjelaskan bagaimana perusahaan transnasional masuk ke negara-negara melalui penguasaan lembaga keuangan dunia untuk mengakses sumber daya alam semisal tambang. Kapitalisme global menguasai faktor-faktor produksi, pertukaran uang, teknologi, orang dan barang bergerak cepat melintasi negara dimana kehadiran negara tidak mampu mengontrol dan menggunakan kewenangannya. Korporasi global yang seperti WTO, IMF, World Bank, bahkan NGO menjadi satu dalam satu kekuatan jaringan kekuasaan. Istilah korporatokrasi dihubungkan dengan kekuasaan perusahaan-perusahaan (korporasi) besar termasuk lembaga keuangan (financial institution) membentuk jaring kekuasaan mengontrol negara dan masyarakatnya (Daeng & Ginting, 2009).

Dalam tulisan Andika, (2014) dalam konteks kebijakan, modal dan perubahan agraria di Kabupaten Morowali sebagai daerah yang memproduksi nikel. Beberapa hal penting yang menjadi permasalahan seperti tentang mekanisme investasi nikel dari waktu ke waktu, hubungan kepemilikan tanah dan perubahan tata guna lahan di Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah. Tambang nikel merupakan faktor penting dalam hubungan produksi yang berlangsung dan penulis melihat secara dalam bagaimana proses pembentukan kelas yang berlangsung di daerah-daerah produsen nikel dan tingkat keselamatan masyarakat dalam kawasan produksi nikel. Asumsinya adalah perlawanan "korban" tambang tumbuh secara berbeda-beda di daerah investasi nikel. Kelompok rentan yang menjadi perhatiannya seperti perempuan memaknai perubahan yang timbul dalam perluasan dan percepatan produksi nikel, misalnya daya bertahan, berjuang, dan tidak sekedar ada di posisi korban.

Peran negara dalam mengontrol kebijakan pertambangan juga terjadi di beberapa negara yang menggiatkan industri tambang seperti di Philipina. Chaloping-March, (2014) menjelaskan bagaimana Undang-Undang Pertambangan tahun 1995 di Philipina merespons aspirasi kelompok-kelompok warga seperti pemerintah daerah. Undang-undang tersebut memberikan kerangka regulasi dan institusi untuk operasi pertambangan skala besar dengan harapan bahwa modal asing yang substansial akan masuk ke kas pemerintah. Undang-undang tersebut juga mengatur mekanisme untuk memastikan konsultasi masyarakat, pemberdayaan pemerintah daerah, perhatian terhadap komunitas adat, dan pembagian manfaat yang adil.

Namun pemerintah pusat bersama industri mineral lebih mementingkan investasi asing dengan mengorbankan rasa keadilan dan manfaat yang diperoleh masyarakat lokal. Pada beberapa kasus pemerintah lokal menghalangi masuknya pertambangan skala besar atau melarang pertambangan galian terbuka. Upaya melalui aturan lokal merupakan bentuk nasionalisme sumber daya berdasar pada lokalitas dan afinitas terhadap tanah air, dan sebagai bentuk perlawanan pada pemerintah pusat dalam hal tata kelola sumber daya.

Tulisan Camba, (2016) menyebutkan bahwa kejatuhan Marcos sebagai pembuka restrukturisasi neoliberal oleh Aquino (1986-1992) mengkonsolidasikan model neoliberal dalam konteks ketidakstabilan politik dan utang ekonomi. Kebijakan Aquino menekankan peran perusahaan asing dalam pemulihan ekonomi nasional dengan membongkar monopoli negara serta mengadopsi kebijakan eksekutif dan memperkuat reformasi administrasi. Kebijakan pemberian insentif pajak rendah,

pembebasan bea impor, dan pembebasan pajak pada lima tahun pertama bagi investasi asing. Aturan ini juga mengubah prinsip kepemilikan tanah dari sistem sewa tradisional, yang memperlakukan tanah sebagai komoditas untuk eksplorasi dan ekstraksi mineral.

Kebijakan pemerintahan berikutnya seperti Ramos (1992-1997) mengadopsi reformasi ekonomi liberal yang luas sebagai cara mengejar ketertinggalan dari negara-negara Asia yang telah maju pesat. Secara khusus, dia mengamankan perjanjian investasi multilateral dan mempromosikan privatisasi pelayanan publik. Presiden Arroyo (2001-2009) menginisiasi Undang-Undang Pertambangan Filipina sebagai jawaban negara terhadap tuntutan investor pertambangan asing untuk mengurangi ketidakpastian dalam industri ekstraktif di Filipina. Pada saat yang sama, reformasi politik yang lebih progresif dilaksanakan seperti pengakuan hak-hak pribumi melalui Undang-Undang Hak-Hak Masyarakat Adat tahun 1997 dan desentralisasi kekuasaan ke unit pemerintah lokal untuk memperkuat otonomi daerah terutama di wilayah Mindanao yang kaya mineral. Restrukturisasi neoliberal mengubah kekuatan sektor pertambangan atas organisasi anti-pertambangan dengan memindahkan medan perjuangan dari jalanan ke domain lembaga negara.

Tulisan ini menganalisis bagaimana sektor pertambangan dan kelompok anti-pertambangan bersaing untuk hasil pertambangan di Filipina. Menurutnya, transisi ke rezim mineral neoliberal telah memberdayakan sektor pertambangan dan melemahkan kelompok anti-pertambangan dengan menggeser medan perjuangan ke ranah lembaga pemerintah dan jaringan industri. Sejak era neoliberal, sektor pertambangan telah mengembangkan dua strategi. Pertama, teknologi penundukan meningkatkan berbagai lembaga publik untuk memilih proses yang bertujuan membuat sektor pertambangan bertanggung jawab dan peka terhadap tuntutan masyarakat lokal. Namun, mereka sering menolak atau kurang memiliki kapasitas untuk campur tangan secara efektif. Kedua, teknologi subjektivitas memungkinkan kelompok pro-industri untuk menentukan sendiri kelayakan lingkungan proyek pertambangan. Konsultan pertambangan, spesialis, dan ilmuwan yang dipilih oleh perusahaan pertambangan menentukan potensi kerusakan lingkungan pada badan air, polusi udara, dan erosi tanah. Karena akses modal pertambangan ke sumber daya ekonomi dan hukum, komunitas anti-pertambangan di seluruh Filipina bersaing dalam situasi yang tidak seimbang untuk melakukan dialog.

Tulisan Aaron Cain, (2013) tentang pertambangan yang menghubungkan Kanada dan Honduras tidak hanya melalui perjanjian perdagangan yang diusulkan dan sejarah panjang perusahaan Kanada yang mengeksploitasi mineral Honduras tetapi juga melalui oposisi masyarakat sipil bersama terhadap pertambangan. Kritik terhadap operasi pertambangan di Kanada dan dukungan pemerintah Kanada terhadap industri ini secara nasional dan luar negeri terus berkembang dengan surat kabar arus utama seperti Toronto Star mencetak artikel yang menggambarkan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di lokasi pertambangan Kanada dan kelompok masyarakat sipil seperti United Church of Canada membuat petisi kepada Pemerintah Kanada untuk pembatasan dukungan terhadap industri mereka. Di Honduras, perlawanan terhadap tambang sudah berlangsung puluhan tahun dan diabaikan oleh pemerintah. Peristiwa kudeta di Honduras terjadi dan dukungan rakyat untuk kontrol ketat atas pertambangan kepada penguasa baru. Tulisan ini mencermati situasi politik saat ini dan historis pertambangan di Honduras dengan fokus pada peran modal Kanada yang telah dan terus dimainkan. Realitas di lapangan dari kegiatan industri pertambangan dan mendukung argumen bahwa

sebagai solidaritas terhadap masyarakat yang terkena dampak sehingga perlu melakukan perubahan yang mendukung industri ekstraktif.

Tulisan Samantha Fox, (2015) menjelaskan tentang sejarah, kekerasan dan munculnya pertambangan di Guatemala. Guatemala adalah negara yang terpecah belah dimana sebagian kecil elit keturunan Eropa menguasai politik dan ekonomi sedangkan mayoritas penduduk pribumi diabaikan dari partisipasi dalam kehidupan publik. Walaupun ada undang-undang multikultural yang tujuannya memberdayakan masyarakat pribumi namun termarginalkan dalam kebijakan dan praktik ekonomi. Tindak kekerasan represif terus menjadi norma, sebuah praktik yang berakar dalam kolonisasi wilayah ini. Kekerasan tidak hanya pada serangan fisik terhadap individu, tetapi juga ada dalam kondisi struktural dari ekonomi dunia. Artikel ini menjelaskan mengapa kekerasan itu muncul dan bagaimana sejarah pengabaian dan praktik diskriminasi etno-rasialis tetap tertanam dalam negara Guatemala dan dalam hubungan pasar. Menurutnya, bahwa warisan kekerasan negara yang berlangsung lama di Guatemala terlembaga melalui keputusan ekonomi dan praktik politik yang diambil oleh elit khususnya pada sektor ekstraktif. Hubungan pribumi-criollo dalam konteks Guatemala, kemudian membahas asal-usul sejarah pertambangan skala besar pada masa konflik bersenjata internal, dan diakhiri sejak penandatanganan Perjanjian Perdamaian pada tahun 1996.

Tulisan Mi'rojul Huda, (2017) mencoba mengembangkan gagasan *good extractive governance* untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pertambangan dengan latar beberapa kasus studi tentang tambang migas. Keberadaan sumber daya alam berupa migas selama ini lebih banyak memunculkan musibah seperti konflik, bencana lingkungan hingga kesenjangan ekonomi di masyarakat. Untuk memaksimalkan potensi sumber daya yang ada, perlu adanya komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk membentuk sebuah tata kelola pemerintahan yang baik di wilayah industri ekstraktif (*Good Extractive Governance*). Hal ini bisa dimulai dengan komitmen pemerintah dalam hal kedaulatan migas dan industri ekstraktif yang lain, serta adanya perencanaan yang partisipatif dalam pengelolaan potensi di daerah.

Gagasan *Good Extractive Governance* pada dasarnya mengarah pada sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang seharusnya berkontribusi dalam memanfaatkan pendapatan besar dari industri ekstraktif untuk pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Saat pemerintahan lemah, maka industri ekstraktif akan lebih berkontribusi dalam kemiskinan, konflik, dan korupsi. Sebaliknya jika industri ekstraktif banyak berkontribusi pada pemerintahan maka niscaya kesejahteraan masyarakat mampu terwujud dengan baik.

2.2. Kerangka Pemikiran.

Memahami alur berpikir yang dibangun berdasarkan permasalahan yang diajukan pada rumusan masalah maka beberapa pemikiran yang menjadi asumsi dalam penelitian ini. Sifat *holisme* dari studi etnografi inti penjelasannya adalah kebudayaan yang akan mengintegrasikan semua permasalahan yang diajukan. Kebudayaan sebagai proses mengacu pada pandangan bahwa kebudayaan bukanlah entitas yang statis atau tetap, tetapi merupakan suatu proses yang terus berubah dan berkembang seiring waktu.

Pemahaman ini melihat bahwa kebudayaan tidak hanya terdiri dari produk atau hasil akhir dari aktivitas manusia, tetapi juga melibatkan interaksi sosial, reproduksi nilai-nilai, penyebaran ide, dan transformasi konteks sosial. Dalam konteks ini, kebudayaan dilihat sebagai sesuatu yang dibentuk oleh interaksi antara individu dan masyarakat, dimana individu-individu terlibat dalam proses

pembentukan, pengembangan, dan transformasi nilai-nilai, norma, bahasa, simbol, teknologi, dan praktik-praktik yang mencirikan suatu kelompok atau masyarakat.

Proses kebudayaan melibatkan berbagai faktor, seperti interaksi antara individu-individu, pertukaran ide dan informasi, adaptasi terhadap perubahan sosial dan lingkungan, pembentukan identitas kelompok, dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Kebudayaan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti kontak antar budaya, globalisasi, migrasi, dan perkembangan teknologi. Kebudayaan tidak hanya dipahami sebagai suatu entitas yang diam dan melekat pada individu atau kelompok, tetapi sebagai suatu proses yang terus berlangsung, saling berinteraksi, dan saling mempengaruhi dalam dinamika sosial yang lebih luas. Definisi kebudayaan sebagai proses ini memungkinkan kita untuk memahami kebudayaan sebagai sesuatu yang dinamis, terus berkembang, dan selalu berubah seiring dengan perkembangan masyarakat dan waktu.

Antropologi dalam memaknai kebudayaan sebagai proses menekankan bahwa kebudayaan adalah respons manusia terhadap kebutuhan biologis dan sosial mereka dalam konteks lingkungan. Kebudayaan terbentuk melalui interaksi manusia dengan lingkungan dan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhannya (Keesing, 1992). Proses kebudayaan melibatkan adopsi, penyesuaian, dan transformasi dalam respons terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan manusia. Demikian halnya Geertz, (1993) yang melihat kebudayaan sebagai sistem makna yang diturunkan secara simbolis. Menurutnya kebudayaan adalah kompleksitas simbolik yang terdiri dari tindakan sosial, perilaku, dan interpretasi yang dilakukan oleh individu dalam suatu masyarakat, bahwa kebudayaan terjadi melalui interpretasi dan makna yang diberikan individu terhadap simbol-simbol dan praktik-praktik kebudayaan.

Sahlins, (1976) menjelaskan bahwa kebudayaan adalah suatu sistem yang terdiri dari pola-pola makna simbolik dan praktik-praktik sosial yang dihasilkan oleh kelompok-kelompok manusia. Kebudayaan bukan hanya sekadar kumpulan norma, nilai, dan tradisi yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat, tetapi juga mencakup cara-cara dimana kelompok tersebut berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Kebudayaan tidak hanya mencakup aspek ideologis dan simbolik, tetapi juga praktik-praktik konkret dalam kehidupan sehari-hari. Sahlins menekankan bahwa kebudayaan merupakan sistem adaptasi manusia terhadap lingkungan dan sosial. Proses kebudayaan melibatkan pemenuhan kebutuhan manusia, interaksi dengan lingkungan, serta transformasi dan reproduksi kebudayaan itu sendiri. Manusia menggunakan kebudayaan untuk berinteraksi dengan lingkungan, memahami dunia, dan memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, Sahlins juga memperkenalkan konsep praktik praktis (*practical reason*) yang mengacu pada cara di mana manusia menggunakan kebudayaan dalam tindakan mereka sehari-hari. Praktik praktis ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti produksi pangan, sistem ekonomi, sistem sosial, dan pola-pola hubungan sosial. Secara keseluruhan Sahlins mendefinisikan kebudayaan sebagai suatu sistem yang mencakup pola-pola makna simbolik dan praktik-praktik sosial yang digunakan oleh kelompok manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan dan memenuhi mereka.

Mengacu pada asumsi pemikiran teoritis diatas untuk melihat dinamika yang terjadi pada masyarakat di kawasan tambang seperti di Bahodopi dimaknai sebagai entitas budaya. Hakikat kebudayaan yang meliputi aspek-aspek kognitif, nilai dan norma, praktek-praktek sosial dan praktek simbolik yang dilakukan sehubungan dengan perubahan serta produk-produk material yang menandai kawasan tambang Bahodopi sebagai suatu unit kebudayaan. Walaupun sedikit menyimpang dari "tesis dominan kebudayaan" (baca=hierarki kebudayaan) yang

melihat kebudayaan sebagai sesuatu yang terjadi secara berulang dalam jangka waktu yang lama dan pola-pola yang mapan yang menciptakan keteraturan dalam sistem sosial karena Aktivitas tambang masih relatif baru dalam dua dekade ini, namun inilah menjadi tantangan bagi penelitian ini untuk menjelaskan keruwetan pada masyarakat di kawasan tambang dalam perspektif etnografi sebagai masyarakat yang berbudaya. Kerangka etnografi untuk medeskripsikan masyarakat di kawasan tambang Bahodopi menggunakan perspektif etnografi reflektif kritis. Studi antropologi atau etnografi yang telah mengalami kemajuan pesat dalam memahami masyarakat dan kebudayaannya pada kurun waktu terakhir. Dalam perkembangan perspektif kajian antropologi beriringan dengan perkembangan metode-metode etnografi sebagai kerangka penjelasannya.

Antropologi (baca=etnologi) sebagai disiplin ilmu mulanya berkembang sebagai “studi dibalik meja” yang mengkaji dokumen-dokumen dari ahli-ahli ilmu lain (etnologi, ahli geologi, ahli botani, ahli biologi, ahli sosial kemasyarakatan, hukum dan bahasa), penziar agama (misi/zending) atau praktisi/pejabat pemerintahan di daerah jajahan yang kemudian dikenal sebagai “etnografi klasik” kemudian melakukan konstruksi “masyarakat luar” seperti Frans Boaz dan penganut evolusionis lainnya. Malinowski kemudian mengubah cara kerja antropologi dengan menekankan pentingnya “kehadiran antropolog” di lapangan penelitian untuk mengatasi kesenjangan antara subjek peneliti dengan objek yang diteliti sebagai bentuk objektivitas keilmiah antropologi yang dikenal dengan “etnografi modern” seiring juga berkembangnya perspektif teoritis struktural dan fungsionalisme. Spradley kemudian menyempurnakan dengan “etnografi baru” dengan perangkat analisis dan langkah-langkah tahapan metodologi etnografinya (Kaplan & Manners 2002; Keesing, 1992; Spradley, 1997).

Perkembangan pemikiran baru dalam ilmu sosial dan antropologi dengan berkembangnya teori-teori kritis seperti teori postmodernism, poststrukturalism dan teori posmo lainnya dengan mengembangkan “etnografi reflektif kritis” yang menggeser pemikiran etnografi sebagai pemerian masyarakat dan kebudayaan yang melihat entitas kebudayaan tidak terbatas hanya menjelaskan kelompok yang homogen dengan batas-batas struktural seperti agama, etnisitas, wilayah dan negara. Perspektif etnografi reflektif kritis digunakan untuk memerikan unit-unit sistem sosial yang lebih kecil dan isu-isu spesifik seperti gender, gaya hidup, komunitas ataupun tema-tema tertentu; Atau dengan keberpihakan pemerian dengan perspektif teoritis tertentu seperti yang dikembangkan seperti Clifford Geertz, Pierre Bourdieu, Edward Said, Gayatri Spivak, Homi K. Bhabha, James Clifford dan penganut teori kritis lainnya.

Secara konkret etnografi reflektif kritis dijelaskan oleh George E. Marcus, (1986; 1999); Denzin dan Lincoln (2010) menjelaskan bahwa penelitian etnografi yang lebih dalam dengan pemikiran kritis tentang interaksi sosial, budaya, dan kekuasaan. Tugas etnografer (peneliti, akademisi, dan praktisi) memahami bahwa etnografi bukan hanya pengamatan dan deskripsi tentang masyarakat dan kebudayaan, tetapi juga tentang mempertanyakan serta merenungkan implikasi sosial dan politik dari apa yang diamati. Penggiat etnografi reflektif kritis dari berbagai bidang ilmu termasuk antropologi, sosiologi, studi budaya, dan ilmu sosial lainnya atau sejumlah aktivis dan penggiat masalah sosial lainnya. Mereka cenderung mengadopsi pendekatan yang kritis terhadap pekerjaan lapangan mereka, menggali makna mendalam dari pengalaman yang mereka dokumentasikan, dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kebijakan, budaya, dan kekuasaan mempengaruhi kehidupan sehari-hari subjek dan kelompok.

Etnografi reflektif kritis bertujuan menghasilkan wawasan yang mendalam tentang kompleksitas dunia sosial dan untuk menyebarkan pengetahuan tersebut dan untuk tujuan perubahan sosial yang lebih baik. Dengan kata lain, studi etnografi sebagai alat untuk membuka mata masyarakat terhadap isu-isu sosial dan budaya yang relevan dan merangsang perubahan positif. Pendekatan etnografi reflektif kritis bagi sejumlah etnografer menyebutnya sebagai “etnografi memihak/berpihak” karena dalam perspektif untuk merubah situasi maka harus berpihak pada “subjek yang lemah” (Hudayana, 2023).

Pada posisi etnografi reflektif kritis inilah pemerian kebudayaan masyarakat Bahodopi yang hidup di kawasan tambang nikel dijelaskan dalam penelitian ini. Membaca situasi di kawasan tambang Bohodopi yang digambarkan pada bagian terdahulu maka permasalahan penelitian dijelaskan dalam perspektif teoritis Henri Lefebvre, Michael Foucault dan Pierre Bourdieu. Lefebvre, (2000) menjelaskan konsep dasar seperti produksi ruang; ruang sosial; dan urbanisasi. Pemikiran Lefebvre tentang produksi ruang bahwa ruang bukan hanya suatu kenyataan fisik, tetapi juga merupakan hasil dari proses sosial, politik, dan ekonomi. Ruang dihasilkan, diorganisir, dan dikendalikan oleh kekuasaan dan kapital sehingga menekankan pentingnya memahami ruang sebagai produk sosial yang dibangun oleh praktik-praktik sosial dan kekuatan-kekuatan yang ada; Ruang sosial yang adalah ruang sosial dan simbolis. Bahwa ruang mencerminkan, membentuk, dan diperdebatkan oleh hubungan sosial, kekuasaan, dan praktik-praktik sehari-hari.

Lefebvre (1991;2000a;2004) menekankan bahwa penting untuk memperhatikan bagaimana ruang sosial dirasakan, diinterpretasikan, dan diakses oleh berbagai kelompok sosial. Kritiknya terhadap urbanisasi secara kritis menganalisis proses urbanisasi dan perubahan perkotaan. Ia menyoroti dampak urbanisasi terhadap ruang, masyarakat, dan kehidupan sehari-hari. Menekankan perlunya memperhatikan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan perkotaan dan kembali mengakui hak warga untuk menciptakan dan mempengaruhi ruang yang mereka huni. Dalam konteks masyarakat di kawasan tambang, Lefebvre memiliki pandangan terhadap kapitalisme dan alienasi yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Ia mengkritik dominasi kapitalis dalam pengorganisasian ruang dan kehidupan sosial. Lefebvre mengadvokasi transformasi sosial yang radikal untuk mengatasi alienasi dan menghidupkan kembali praktek-praktek manusiawi yang terpinggirkan.

Kawasan tambang sebagai sebuah ruang sesungguhnya tidak ada ruang yang sepenuhnya ideal karena ruang itu sendiri secara spasial dalam masyarakat kapitalis modern merupakan arena pertarungan yang tidak akan pernah selesai diperebutkan. Semua pihak yang berkepentingan akan terus berusaha mencari cara untuk mendominasi pemakaian atau pemanfaatan atas suatu ruang dan mereproduksi segala pengetahuan untuk mempertahankan hegemoni mereka atas pemanfaatan ruang tersebut. Kawasan tambang sebagai ruang bersama (*common space*) akan selalu menyesuaikan kepentingan kapital dalam rangka menjamin relasi atau hubungan produksi dan reproduksi yang bersifat kapitalistik. Dalam pengertian ini, produksi ruang secara spasial akan mempengaruhi mentalitas para penghuninya sehingga menciptakan apa yang disebut oleh sebagai produksi ruang sosial, yakni relasi produksi antara ruang secara spasial dengan masyarakat.

Untuk memahami ruang dalam kaitannya dengan sejarah dan konteks secara spesifik dijelaskannya bahwa ruang sosial dibentuk oleh tindakan sosial (*sosial/ action*), baik secara individual maupun secara kolektif. Tindakan sosial yang memberi “makna” pada bagaimana suatu ruang spasial dikonsepsikan oleh mereka yang

mengisi dan menghidupkan ruang tersebut. Produksi ruang sosial berkenaan dengan bagaimana praktik spasial diwujudkan melalui persepsi atas lingkungan (*environment*) yang dibangun melalui jaringan (*networks*) yang mengaitkan aktivitas-aktivitas sosial seperti pekerjaan, kehidupan pribadi (*private life*), dan waktu luang (*leisure*).

Pemikiran Lefebvre berkontribusi penting dalam memahami hubungan antara ruang, kekuasaan, dan masyarakat. Dalam konteks etnografi pertambangan, teori Lefebvre dapat digunakan untuk menganalisis produksi ruang dan ruang sosial sebagai konsekuensi perubahan dari ruang pertanian ke ruang pertambangan, perubahan sosial dan ruang yang diakibatkannya, serta konflik dan perubahan yang timbul akibat dominasi kapitalis dalam pengorganisasian ruang dan sumber daya.

Pemikiran Foucault, (1980) pada konsep dasar kekuasaan (*power*) dan pengetahuan (*knowledge*) juga digunakan untuk bagaimana dinamika kekuasaan terhadap ruang yang dibentuk melalui wacana pengetahuan dan kekuasaan. Pemikiran Foucault tentang konsep kekuasaan lebih pada relasi kuasa bahwa kekuasaan yang tidak dimiliki oleh subjek atau kelompok tetapi hadir dalam setiap aspek masyarakat. Kekuasaan beroperasi melalui berbagai mekanisme dan tidak selalu bersifat represif atau negatif. Foucault menjelaskan kekuasaan sebagai mekanisme produktif yang membentuk hubungan sosial, wacana, dan praktik. Kekuasaan dan pengetahuan saling terkait, karena kekuasaan menghasilkan pengetahuan dan pengetahuan memperkuat kekuasaan. Konsep pemikiran Foucault lainnya adalah kekuasaan dan mekanisme kontrolnya. Dalam konteks etnografi pertambangan, peneliti dapat menggunakan perspektif Foucault untuk menganalisis bagaimana kekuasaan beroperasi di antara berbagai pihak yang terlibat dalam industri pertambangan, seperti perusahaan tambang, pemerintah, pekerja, dan komunitas lokal. Ini dapat melibatkan pemeriksaan kebijakan, tindakan pengawasan, praktik disiplin, dan mekanisme kontrol lainnya yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari pekerja dan masyarakat sekitar.

Aspek penjelasan Foucault lainnya adalah pengetahuan dan wacana. Menurutnya pengetahuan tidaklah netral melainkan dibentuk oleh kekuasaan. Dalam etnografi komunitas lokal di kawasan pertambangan dapat dianalisis bagaimana pengetahuan tentang pertambangan diproduksi, didistribusikan, dan digunakan untuk mempengaruhi tindakan dan sikap berbagai aktor yang terlibat. Ini dapat dijelaskan melalui narasi dan diskursus yang muncul di sekitar pertambangan, seperti bagaimana perusahaan mempromosikan narasi tentang manfaat ekonomi dan pengembangan, atau bagaimana komunitas lokal mengekspresikan kekhawatiran tentang dampak lingkungan dan sosial pertambangan.

Pemikiran Foucault juga digunakan untuk menjelaskan upaya subjek dan kelompok untuk melawan kekuasaan dan kontrol. Dalam konteks etnografi pertambangan, peneliti dapat meneliti bagaimana aktor-aktor dalam komunitas pertambangan mengorganisir diri, membentuk identitas kolektif, dan melawan praktik-praktik yang dianggap tidak adil atau merugikan. Ini melibatkan pemahaman tentang strategi perlawanan dan taktik pemberdayaan yang digunakan oleh kelompok-kelompok tersebut. Kawasan tambang dan kelompok-kelompok masyarakat yang bermukim di kawasan tambang seperti di Bahodopi sarat dengan konflik dan kontestasi sebagai bentuk dinamika.

Pemikiran Bourdieu digunakan dalam penjelasan dinamika masyarakat dalam kawasan tambang dalam penelitian seperti konsep kekuasaan, struktur sosial, stratifikasi, kapital, dan reproduksi sosial. (Bourdieu, 1984, 1993, 1998, 2002). Modal (*capital*) sebagai salah satu konsep sentral yang digunakan mengidentifikasi

bentuk-bentuk kapital yang dimiliki subjek maupun kolektif dalam masyarakat, termasuk kapital ekonomi (kekayaan dan aset), kapital sosial (hubungan sosial dan jaringan), kapital budaya (pengetahuan, keahlian, dan kesadaran budaya), dan kapital simbolik (pengakuan dan legitimasi). Bourdieu berpendapat bahwa kepemilikan dan distribusi kapital ini memainkan peran penting dalam membentuk struktur sosial dan menentukan posisi seseorang dalam hierarki sosial (baca=kekuasaan).

Konsep habitus mengacu pada struktur mental dan fisik yang terbentuk oleh pengalaman subjek dan lingkungan sosialnya. Habitus mencakup kecenderungan, keyakinan, sikap, dan pola perilaku yang dimiliki dan ditanamkan oleh individu. Habitus membentuk persepsi dan tindakan individu, dan juga berperan dalam mempertahankan dan mereproduksi ketimpangan sosial. Konsep ini untuk melihat bagaimana penerimaan tambang sebagai ruang baru yang mendorong perilaku, keyakinan dan sikapnya. Dapat juga digunakan mempelajari pola perilaku, keyakinan, dan sikap yang ada diantara orang-orang yang berada di wilayah pertambangan, komunitas lokal, atau kelompok lain yang terlibat dalam industri tersebut. Habitus subjek dan kelompok dapat mempengaruhi interaksi, pengambilan keputusan, dan reproduksi struktur sosial di dalam konteks pertambangan.

Konsep arena (*field*) Bourdieu menjelaskan wilayah sosial tertentu yang memiliki aturan, hierarki, dan dinamika internalnya sendiri. Arena (*field*) melibatkan interaksi antara individu, kelompok, dan institusi yang jika digunakan untuk menyoroti kawasan pertambangan sebagai arena sosial yang memiliki aturan, dinamika internal, dan hirarki sendiri. Pada point ini dapat menjadi cara analisis bagaimana interaksi, persaingan, dan distribusi kapital terjadi di dalam bidang pertambangan, serta peran kekuasaan dan agensi subjek atau kelompok di dalamnya.

Teori reproduksi sosial Bourdieu dapat membantu memahami bagaimana ketimpangan sosial dan struktur kekuasaan dipertahankan dalam konteks pertambangan. Peneliti etnografi dapat menganalisis bagaimana praktik-praktik sosial, sistem pendidikan, dan mekanisme reproduksi lainnya mempengaruhi kemungkinan subjek atau kelompok untuk mengubah posisi sosial mereka dalam industri pertambangan. Bourdieu berpendapat bahwa struktur sosial dan ketimpangan sosial cenderung dipertahankan dan direproduksi dari generasi ke generasi melalui praktik-praktik yang terinternalisasi. Subjek dan yang memiliki akses lebih terhadap kapital cenderung mempertahankan keunggulan mereka, sedangkan mereka yang kurang beruntung akan menghadapi kesulitan dalam mengubah posisi sosial mereka. Reproduksi sosial terjadi melalui proses sosialisasi, pendidikan, dan pengaruh lingkungan sosial.

Praktek simbolik juga menjadi elemen penjelasan pada masyarakat untuk di kawasan tambang untuk mempertegas kekuasaan maupun dominasi. Bourdieu menekankan pentingnya tindakan simbolik dalam mempertahankan dan memperkuat ketimpangan sosial dengan melihat bagaimana simbol, ritual, dan praktik budaya dapat digunakan oleh kelompok yang memiliki kekuasaan untuk memperkuat dominasi mereka dan mempertahankan struktur sosial yang ada.

Pemikiran Lefebvre, Foucault dan Bourdieu dengan kerangka pendekatan etnografi reflektif kritis, peneliti mendapatkan pemahaman berbeda tentang dinamika sosial, kekuasaan, dan budaya yang ada dalam masyarakat termasuk komunitas lokal yang bermukim di kawasan pertambangan sekaligus menganalisis dan menjelaskan permasalahan penelitian yang diajukan.

Kawasan tambang sebagai sebuah ruang sesungguhnya tidak ada ruang yang sepenuhnya ideal karena ruang itu sendiri secara spasial dalam masyarakat kapitalis

modern merupakan arena pertarungan yang diperebutkan. Semua pihak yang berkepentingan berusaha mencari cara untuk mendominasi pemakaian atau pemanfaatan atas suatu ruang dan mereproduksi segala pengetahuan untuk mempertahankan hegemoni mereka atas pemanfaatan ruang tersebut. Dengan kata lain, ruang bersama (*common space*) akan selalu menyesuaikan kepentingan kapital dalam rangka menjamin relasi atau hubungan produksi dan reproduksi yang bersifat kapitalistik. Dalam pengertian ini pulalah produksi ruang secara spasial akan mempengaruhi mentalitas para penghuninya sehingga menciptakan apa yang disebut oleh Lefebvre, (2000b, 2004) sebagai produksi ruang sosial, yakni relasi produksi antara ruang secara spasial dengan masyarakat.

Memahami ruang dalam kaitannya dengan sejarah dan konteks secara spesifik dijelaskannya bahwa ruang sosial dibentuk oleh tindakan sosial (*social action*), baik secara individual maupun secara kolektif. Tindakan sosiallah yang memberi "makna" pada bagaimana suatu ruang spasial dikonsepsikan oleh mereka yang mengisi dan menghidupkan ruang tersebut. Produksi ruang sosial berkenaan dengan bagaimana praktik spasial diwujudkan melalui persepsi atas lingkungan (*environment*) yang dibangun melalui jaringan (*networks*) yang mengaitkan aktivitas-aktivitas sosial seperti pekerjaan, kehidupan pribadi (*private life*), dan waktu luang (*leisure*).

Pertemuan antara modal (*capital*) dengan segala ikutannya seringkali dipandang berbenturan dengan komunitas lokal. Komunitas lokal dan perusahaan dalam beberapa pemahaman menempatkannya dalam dua kutub yang berbeda (*oposisi biner*), alih-alih dipersatukan bahkan keduanya saling menegasikan. Demikian banyak pemahaman yang berkembang selama ini. Akibatnya kehadiran sebuah perusahaan atau industri di suatu wilayah yang mana di dalamnya terdapat masyarakat atau penduduk asli akan berakibat pada disharmonisasi relasi di antara keduanya.

Gejala disharmonisasi terjadi karena sudut pandang yang berbeda dalam melihat sumberdaya (*resource*), di satu sisi (perusahaan) melihat penduduk asli tidak terlalu mendapatkan perhatian karena pembangunan atau pengembangan masyarakat menjadi bagian tugas dari pemerintah setempat, cukup bagi perusahaan dengan membayar pajak kepada pemerintah. Terlebih lagi, komunitas lokal tersebut tidak memungkinkan dilibatkan sebagai tenaga kerja dalam perusahaan karena kapasitas/skill tidak cukup memberikan kontribusi dalam proses produksi. Dilain pihak komunitas lokal memiliki perspektif kesejarahan dan nilai-nilai, norma-norma dan pranata lokal terhadap wilayah yang menjadi tempat beraktivitasnya perusahaan tambang. Secara historis mereka memahami bahwa wilayah tersebut menjadi bagian integral dari eksistensinya sebagai suatu kelompok/masyarakat dengan ruang.

Wilayah tambang dan komunitas lokal yang bermukim di kawasan tambang tentunya sarat dengan konflik dan kontestasi sebagai bentuk dinamika. Konflik dan kontestasi ini sendiri kemudian menjadi bagian yang terpisahkan dari ruang-ruang yang ada. Sejatinya merupakan bagian dari usaha menegosiasikan peluang dari aktor ataupun kelompok dalam berbagai ruang. Pada akhirnya, berbagai kesepakatan yang dihasilkan untuk menciptakan kondisi hubungan yang lebih baik antar komunitas lokal dan perusahaan tambang. Pengetahuan, pengalaman empiris dan pola-pola hubungan yang dilakukan itu secara berulang dilakukan oleh perusahaan tambang dan komunitas lokal sebagai bentuk *re-order* (pengaturan kembali) hubungan yang dalam konteks ruang baru yang telah berubah dari pola-pola lama dari ruang dan praktek-praktek pengelolaan sumberdaya alam.

Konteks penjelasan tentang etnografi komunitas lokal di kawasan pertambangan pada tiga level; pertama, perusahaan tambang sebagai pemilik izin usaha melakukan aktivitas pertambangan dalam ruang yang sama dan dimanfaatkan oleh komunitas lokal.; kedua, pemerintah pusat dan daerah yang memberikan izin melalui regulasi dan kebijakan yang mengakibatkan tumpang tindih pemanfaatan ruang; ketiga komunitas lokal yang menjadikan kawasan tambang sebagai ruang hidup, ruang aktifitas dan mempraktekkan berbagai macam pola-pola hubungan dengan ruang sebagai bentuk kebudayaan.

Permasalahan penelitian dijelaskan dengan menggunakan dengan mendeskripsikan data. **Masalah pertama** membahas tentang bagaimana memaknai kawasan tambang sebagai ruang baru mempengaruhi ekologi, ekonomi, sosial dan budaya oleh komunitas lokal. Permasalahan ini diuraikan beberapa bagian yakni: (i) pemaknaan terhadap ruang baru yang mempengaruhi kehidupan ekologi dengan menganalisis pemanfaatan lingkungan ekologi sebagai ruang hidup sebelumnya oleh komunitas lokal; keterikatan komunitas lokal dengan ruang lama sebagai bagian dari sistem ekologi melalui praktek-praktek pemanfaatan ruang fisik (hutan dan lahan), sistem nilai budaya yang merepresentasikan komunitas lokal dalam pemanfaatan ruang, konteks-konteks yang menyebabkan terjadinya perubahan pemanfaatan ruang; aktivitas pertambangan dan dampak kerusakan ekologi, perubahan pola pemanfaatan dan pemenuhan kebutuhan komunitas lokal yang berbasis pada sumberdaya alam dengan keberadaan tambang; perubahan lingkungan permukiman komunitas lokal; ruang-ruang baru yang merepresentasikan masyarakat yang bekerja di sektor pertambangan; (ii) pemaknaan terhadap ruang baru yang mempengaruhi kehidupan ekonomi komunitas lokal dengan menganalisis: perubahan aktivitas ekonomi oleh komunitas lokal pada ruang lama; aktifitas ekonomi baru oleh komunitas lokal pada ruang baru yang berhubungan dengan kegiatan tambang, peluang ekonomi baru terkait keberadaan pekerja di sektor tambang dalam kawasan Bahodopi, menganalisis perubahan struktur dan relasi dalam produksi ekonomi pada ruang baru, menganalisis perubahan dan tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, menganalisis dampak perubahan ruang terhadap pendapatan, struktur lapangan kerja, kesejahteraan komunitas lokal; (iii) pemaknaan ruang baru yang mempengaruhi kehidupan sosial komunitas lokal dengan menganalisis interaksi dalam komunitas setelah kehadiran perusahaan tambang; menganalisis kelembagaan (pranata sosial budaya) yang masih berfungsi seperti sistem kekerabatan; sikap kolektif seperti saling bantu dalam kerabat dan gotong-royong, menganalisis organisasi sosial kemasyarakatan seperti paguyuban, kerukunan, dan serikat pekerja, menganalisis peran lembaga pemerintah tingkat lokal (desa, kecamatan dan kabupaten); (iv) pemaknaan terhadap ruang baru yang mempengaruhi kehidupan budaya komunitas lokal meliputi perubahan kognisi; perubahan sistem nilai dan perubahan gaya hidup. Pada level ini dilakukan analisis terhadap perubahan orientasi ruang oleh komunitas lokal seperti cara pandang terhadap perubahan ruang bekerja dari sektor subsisten (pertanian dan nelayan) kepada industri; menganalisis perubahan tentang nilai lahan/tanah dari faktor produksi menjadi aset; menganalisis perubahan kultur bekerja terkait ruang, waktu dan relasi dalam perusahaan, menganalisis perubahan nilai terhadap ruang bekerja bagi perempuan dan anak dari sektor domestik ke sektor publik.

Masalah kedua yang membahas tentang dinamika komunitas lokal merubah ruang, struktur dan relasi dalam ruang baru (pertambangan) dengan menganalisis praktek-praktek penguasaan lahan oleh perusahaan, individu dan kolektif, menganalisis praktek eksklusi (pembatasan akses terhadap lahan pertanian), land

grabbing (praktek perampasan lahan) dan akuisisi lahan (pengalihan penguasaan lahan melalui mekanisme ganti rugi) oleh perusahaan tambang terhadap ruang; Konflik komunitas lokal dengan perusahaan tambang; menganalisis peran pemerintah lokal (desa) dan kelembagaan desa mempengaruhi mekanisme rekrutmen bagi tenaga kerja pendatang, menganalisis praktek negosiasi komunitas lokal dengan perusahaan tambang terkait akses atau peluang bekerja bagi tenaga kerja lokal dan kepentingan kolektif terkait penggunaan fasilitas desa.

Masalah ketiga yang membahas penggunaan modal modal sosial, budaya dan politik; menganalisis modal sosial dan budaya dan politik yang masih berfungsi dalam ruang baru; menganalisis praktek-praktek kolektif dengan menggunakan modal sosial dan budaya dan politik untuk kepentingan kolektif, menganalisis praktek-praktek penggunaan modal sosial dan budaya dan politik untuk kepentingan individu. Secara terperinci alur pemikiran penelitian ini seperti pada bagan berikut:

Gambar 1. Bagan Alur Pemikiran



